



Kecamatan Bekasi Selatan

RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan.....	8
1.3.3 Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI SELATAN	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Selatan	27
2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	28
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bekasi Selatan.....	33
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan.....	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	42
2.2.1 Permasalahan	42
2.2.2 Isu Strategis.....	47
2.3 Telaahan.....	51
2.3.1 Telaahan Terhadap RPJMD Kota Bekasi	51
2.3.2 Telaahan RPJMN	81
2.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	83
BAB III	91
TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN	91
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan	91
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Selatan.....	93
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	96
3.3.1 Strategi.....	96
3.3.2 Arah Kebijakan.....	98
BAB IV	101

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	101
4.1 Uraian Program.....	101
4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	102
4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.....	104
4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	104
4.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.....	106
4.1.5 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	107
4.2 Uraian Kegiatan.....	108
4.2.1 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	113
4.2.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	135
4.2.3 Target Keberhasilan terhadap IKU.....	137
BAB V	139
PENUTUP	139

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Kecamatan Bekasi Selatan sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Bekasi memiliki kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahunan. Renstra ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan kecamatan dan pengukuran kinerja pembangunan.

Penyusunan Renstra ini menjadi penting sebagai upaya mendukung pencapaian visi Kota Bekasi, yaitu “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.” Kecamatan Bekasi Selatan memiliki peran strategis karena merupakan salah satu wilayah padat penduduk, pusat layanan publik, dan kawasan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Dengan kompleksitas permasalahan dan dinamika masyarakat yang tinggi, diperlukan perencanaan pembangunan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis data.

Isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bekasi Selatan antara lain masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja kecamatan, belum optimalnya pelayanan publik, rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan, dan masih adanya wilayah yang belum tertib dan aman. Oleh karena itu, Renstra ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan kecamatan,

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dan lembaga lokal dalam pembangunan.

Lebih jauh, penyusunan Renstra ini juga menjadi instrumen penting dalam proses evaluasi dan pengendalian pembangunan kecamatan. Setiap tujuan dan sasaran dirumuskan secara terukur, disertai dengan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas agar pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dinilai secara sistematis.



Gambar 1.1
Alur Perencanaan dan Penganggaran

Renstra ini disusun melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Renstra sebelumnya, masukan dari stakeholder, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. Dengan demikian, diharapkan dokumen ini tidak

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan perubahan nyata dan peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Selatan dengan RPJMD Kota Bekasi 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Hubungan antara Renstra kecamatan dan RPJMD kota ini tidak hanya bersifat hirarkis administratif, tetapi juga substantif strategis, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi pembangunan kota secara menyeluruh.

Visi Kota Bekasi dalam RPJMD 2025–2029 adalah *“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”*. Visi ini dijabarkan ke dalam berbagai misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan sebagai perangkat daerah kewilayahan memiliki peran penting dalam menyukseskan pencapaian indikator makro dan indikator kinerja utama pemerintah kota.

Renstra Kecamatan Bekasi Selatan diarahkan untuk mendukung beberapa sasaran strategis utama RPJMD Kota Bekasi, antara lain:

1. **Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat**, yang diwujudkan melalui peningkatan zona tertib, pelaksanaan program ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan indeks harmoni daerah.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. **Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima**, yang dicapai melalui peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan di tingkat kecamatan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKM) dalam mendukung pelayanan.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel**, yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan.
4. **Terwujudnya iklim investasi yang kondusif**, melalui peran kecamatan dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan wilayah, serta memperkuat pelayanan administratif yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Penjabaran lebih lanjut dari hubungan Renstra dan RPJMD ini dapat dilihat pada keselarasan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Bekasi Selatan dengan indikator outcome dan output pada RPJMD. Misalnya, target peningkatan IKM secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan upaya konkret kecamatan dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Kota Bekasi. Selain itu, target peningkatan zona tertib sebesar 20% setiap tahun sejalan dengan program ketenteraman umum yang menjadi prioritas kota.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Bekasi Selatan 2025–2029 tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian penting dalam kerangka besar pembangunan daerah Kota Bekasi. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kecamatan akan terus diselaraskan dengan dokumen perencanaan kota agar dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan Bekasi yang nyaman, sejahtera, dan berdaya saing.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 - n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
- q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E)
- r. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 33 Seri E);
- s. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
- t. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D1.3 Maksud dan Tujuan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan kajian ulang Pemerintah Kota Bekasi terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menjadi landasan dalam

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

penetapan kewenangan serta sinkronisasi pelaksanaan pembangunan oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan daerah.

Selain itu, penyusunan Renstra ini mempertimbangkan perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024–2026, serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan secara terpadu dan sistematis berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, peran Kecamatan Bekasi Selatan sebagai perangkat daerah kewilayahan menjadi strategis dalam memastikan agar seluruh program dan kegiatan pembangunan berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi, serta melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat di wilayah kecamatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan adalah:

1. Menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Bekasi Selatan secara sistematis dan terukur untuk periode 2025–2029;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi dengan rencana kerja tahunan di tingkat kecamatan;
3. Menjadi acuan bagi seluruh aparatur kecamatan dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan melalui perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala;
5. Mendorong transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Kecamatan Bekasi Selatan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan masyarakat yang tertib, partisipatif, dan sejahtera.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut

BAB I – Pendahuluan

Menjelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya perencanaan strategis kecamatan.

BAB II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat uraian tentang profil Kecamatan Bekasi Selatan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta gambaran kondisi pelayanan publik yang telah dan sedang diselenggarakan.

BAB III – Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi berbagai permasalahan nyata dan isu strategis yang dihadapi kecamatan, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi pencapaian kinerja dan pelayanan publik.

BAB IV – Tujuan dan Sasaran

Merumuskan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bekasi Selatan dalam lima tahun ke depan, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis dan arah pembangunan Kota Bekasi.

BAB V – Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi penjabaran strategi serta arah kebijakan pembangunan kecamatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VI – Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Memuat daftar program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh kecamatan, berikut alokasi pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan selama periode 2025–2029.

BAB VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menyajikan evaluasi capaian kinerja kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, termasuk refleksi atas program/kegiatan sebelumnya.

BAB VIII – Penutup

Menutup dokumen Renstra dengan kesimpulan umum, komitmen perangkat daerah dalam implementasi rencana, serta harapan untuk peningkatan pelayanan dan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI SELATAN

Evaluasi kinerja instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pemerintahan modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kecamatan sebagai unit kerja perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, perlu menunjukkan kinerja yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

Pada tahun 2024, Kecamatan Bekasi Selatan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bekasi. Capaian kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan dievaluasi melalui indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Tulisan ini menyajikan analisis deskriptif dan analisis diagnostik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2024. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kinerja organisasi, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk perbaikan ke depan, terutama dalam konteks penyusunan Rencana Strategis 2025–2029

Tabel 2.1
Capaian IKU tahu sebelumnya

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra OPD			Realisasi			Capaian		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	76	NA	NA	75.16	NA	NA	98.9%	NA	NA
2	Indeks Kepuasan	Nilai	82	NA	NA	82.1	NA	NA	82.1%	NA	NA
3	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	%	5%	NA	NA	8%	NA	NA	8%	NA	NA

Dalam konteks evaluasi kinerja Kecamatan Bekasi Selatan, terdapat tiga indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tolok ukur utama, yaitu Nilai AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Persentase Peningkatan Wilayah Tertib.

1. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,16 dari target 76, atau dengan tingkat capaian 98,9%. Nilai ini terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu:

- Perencanaan Kinerja: 23,36 dari bobot 30
- Pengukuran Kinerja: 21,82 dari bobot 35
- Pelaporan Kinerja: 11,61 dari bobot 15
- Evaluasi Internal: 18,37 dari bobot 25

Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaporan telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek evaluasi internal dan pengukuran kinerja yang belum mencapai nilai maksimal.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM pada tahun 2024 mencapai 82,1 dari target 82, atau setara dengan 100,12%. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Bekasi Selatan sangat memuaskan masyarakat. Capaian ini diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang mencakup berbagai dimensi pelayanan, seperti kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kenyamanan fasilitas, dan kemudahan prosedur.

3. Persentase Peningkatan Wilayah Tertib

Target peningkatan wilayah tertib pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 5%, namun realisasinya mencapai 8%, atau tingkat capaian sebesar 160%. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan penertiban wilayah secara rutin dan kolaboratif antara kecamatan, kelurahan, Satpol PP, serta unsur masyarakat dan keamanan (Babinsa, Bhabinkamtibmas).

Analisis diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pencapaian kinerja. Dengan mengetahui penyebab capaian atau deviasi dari target, organisasi dapat merancang strategi yang tepat untuk perbaikan kinerja.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

A. Analisis Diagnostik: Nilai AKIP

1. Faktor Pendukung

- Tersusunnya dokumen perencanaan secara sistematis sesuai siklus SAKIP.
- Adanya pengawasan dan pelaporan berkala melalui forum koordinasi kecamatan.
- Pemanfaatan aplikasi e-kinerja dan e-SAKIP dalam proses dokumentasi.

2. Faktor Penghambat

- Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam memahami substansi evaluasi internal.
- Kelemahan dalam dokumentasi hasil monitoring kegiatan harian.
- Kurangnya pelatihan teknis secara berkala mengenai pengisian instrumen evaluasi.

3. Rekomendasi

- Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis SAKIP dan manajemen kinerja.
- Menjadwalkan monitoring dan evaluasi internal secara rutin.
- Meningkatkan koordinasi lintas seksi dalam penyusunan laporan kinerja.

B. Analisis Diagnostik: Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Faktor Pendukung

- Implementasi pelayanan berbasis digital melalui loket pelayanan online.
- Pelatihan front office dan peningkatan etika pelayanan petugas.
- Peningkatan fasilitas pelayanan melalui rehabilitasi ruang tunggu dan loket.

2. Faktor Penghambat

- Masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan digital.
- Fasilitas pelayanan belum merata di seluruh kelurahan.
- Keterbatasan anggaran untuk inovasi pelayanan di beberapa seksi.

3. Rekomendasi

- Menambah kanal informasi edukatif terkait pelayanan berbasis daring.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Melakukan survei kepuasan secara periodik untuk umpan balik layanan.
- Mendorong kolaborasi CSR untuk peningkatan fasilitas pelayanan.

C. Analisis Diagnostik: Peningkatan Wilayah Tertib

1. Faktor Pendukung

- Konsistensi pelaksanaan kegiatan K3 setiap minggu pertama dan keempat.
- Adanya sinergi aktif dengan Satpol PP dan kepolisian.
- Tingginya partisipasi warga dalam menjaga kebersihan dan ketertiban.

2. Faktor Penghambat

- Ketidakpatuhan sebagian warga terhadap ketentuan zona tertib.
- Kurangnya personel pengawasan di beberapa kelurahan.
- Belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk kampanye K3.

3. Rekomendasi

- Mengembangkan sistem pelaporan online pelanggaran wilayah tertib.
- Meningkatkan penyuluhan dan edukasi kepada warga secara masif.
- Mendorong peran serta RT/RW dalam pengawasan ketertiban lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan urusan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bekasi Selatan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian indikator yang secara umum mendekati atau melampaui target. Namun demikian, capaian ini belum boleh membuat lengah karena tantangan ke depan akan semakin kompleks.

Penyusunan Renstra 2025–2029 perlu mempertimbangkan hasil evaluasi ini sebagai bahan refleksi untuk menetapkan strategi yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Fokus ke depan harus diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan wilayah yang lebih tertib dan harmonis melalui pendekatan partisipatif. Dengan strategi yang tepat, Kecamatan Bekasi Selatan dapat menjadi model tata kelola wilayah yang akuntabel, inovatif, dan berpihak pada masyarakat

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2024 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan sebagaimana tabel berikut :

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi TA 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
Kecamatan Bekasi Selatan	34.628.99 3.400	25	3.624.88 8.506	0	8.777.10 7.849	62	8.551.92 4.138	12	12.358.04 0.761	100	33.311.961 .254
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.803.55 8.800	17	3.605.60 3.506	0	6.857.06 9.849	65	5.040.26 3.238	18	6.175.446 .871	100	21.678.383 .464
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0	0	0	0	10 0	0	0	2.399.860	100	2.399.860
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	0	0	0	0	1	0	0	2.399.860	1	2.399.860
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.507.55 8.000	60	1.853.10 9.441	0	3.955.63 8.723	23	2.263.01 4.081	17	2.671.426 .395	100	10.743.188 .640
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.504.55 8.000	58	1.853.10 9.441	0	3.955.63 8.723	0	2.263.01 4.081	0	2.669.026 .605	58	10.740.788 .850

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Kuangan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	3	0	0	0	7	0	5	2.399.790	15	2.399.790
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>10.000.00 0</i>	0	0	0	0	0	0	10 0	10.000.00 0	100	10.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.00 0	0	0	0	0	0	0	32	10.000.00 0	32	10.000.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>622.500.0 00</i>	19	264.179. 825	0	153.059. 452	72	67.216.3 20	8	109.772.0 30	100	594.227.62 7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.00 0	0	0	0	0	1	19.600.0 00	0	0	1	19.600.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.500.0 00	2	218.367. 325	0	15.970.5 00	1	10.976.0 00	0	14.051.50 0	3	259.365.32 5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.00 0	0	0	0	49.915.8 80	2	3.888.32 0	0	5.874.530	2	59.678.730

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuangan		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.00 0	3	0	0	1.934.00 0	6	10.352.0 00	3	1.718.000	12	14.004.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.0 00	3	45.812.5 00	0	85.239.0 72	6	17.900.0 00	3	88.128.00 0	12	237.079.57 2
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	0	0	0	0	50	4.500.00 0	0	0	50	4.500.000
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>264.805.0 00</i>	0	0	0	0	10 0	208.300. 000	0	48.628.00 0	100	256.928.00 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.805.0 00	0	0	0	0	46	208.300. 000	0	48.628.00 0	46	256.928.00 0
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>9.740.695. 800</i>	25	1.488.31 4.240	0	2.675.48 5.200	50	2.296.39 9.135	25	3.010.528 .221	100	9.470.726. 796
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	331.448.6 00	3	37.487.9 84	0	88.116.4 07	6	71.108.5 09	3	58.842.58 8	12	255.555.48 8

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuangan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.409.247. 200	3	1.450.82 6.256	0	2.587.36 8.793	6	2.225.29 0.626	3	2.951.685 .633	12	9.215.171. 308
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>655.000.0 00</i>	0	0	0	72.886.4 74	82	205.333. 702	18	322.692.3 65	100	600.912.54 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.00 0	0	0	0	16.739.9 69	2	31.860.4 01	0	30.797.06 5	2	79.397.435
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.0 00	0	0	0	24.304.5 05	26	40.959.3 01	7	104.619.3 00	33	169.883.10 6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.00 0	0	0	0	31.842.0 00	42	22.814.0 00	8	22.600.00 0	50	77.256.000

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Kuangan		
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.000.0 00	0	0	0	0	2	109.700. 000	1	164.676.0 00	3	274.376.00 0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	500.195.0 00	11	19.285.0 00	0	144.146. 500	79	100.966. 000	11	210.576.0 00	100	474.973.50 0
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	495.000.0 00	8	19.285.0 00	0	144.146. 500	83	100.966. 000	8	210.576.0 00	100	474.973.50 0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.00 0	3	19.285.0 00	0	0	6	0	3	0	12	19.285.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	95.000.00 0	3	0	0	24.747.5 00	6	12.847.0 00	3	55.150.00 0	12	92.744.500

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuangan		
terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum											
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.00 0	0	0	0	31.050.0 00	2	17.348.0 00	0	44.133.70 0	2	92.531.700
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.00 0	0	0	0	50.263.0 00	2	13.531.0 00	0	29.700.00 0	2	93.494.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	95.000.00 0	0	0	0	38.086.0 00	2	12.100.0 00	0	35.993.00 0	2	86.179.000

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuangan		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum											
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	95.000.00 0	0	0	0	0	2	45.140.0 00	0	45.599.30 0	2	90.739.300
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.195.000	25	0	0	0	50	0	25	0	100	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.195.000	3	0	0	0	6	0	3	0	12	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.171.63 9.600	38	0	0	1.768.49 6.500	55	3.387.61 0.400	7	5.925.465 .890	100	11.081.572 .790

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuangan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.891.63 9.600	56	0	0	1.750.24 6.500	35	3.185.71 0.400	10	5.868.235 .890	100	10.804.192 .790
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.0 00	6	0	0	116.079. 000	0	0	0	0	6	116.079.00 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.0 00	0	0	0	0	3	0	1	200.000.0 00	4	200.000.00 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.0 00	0	0	0	0	1	0	0	200.000.0 00	1	200.000.00 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.0 00	0	0	0	0	3	0	1	200.000.0 00	4	200.000.00 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.0 00	0	0	0	0	3	0	1	200.000.0 00	4	200.000.00 0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.0 00	0	0	0	0	3	0	1	200.000.0 00	4	200.000.00 0

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuangan		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	424.906.6 00	7	0	0	48.935.0 00	0	157.358. 500	0	200.403.0 00	7	406.696.50 0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.783.377. 600	25 9	0	0	317.030. 400	0	678.578. 400	0	774.147.2 00	259	1.769.756. 000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.575.904. 000	12 7	0	0	263.726. 400	0	585.831. 600	0	723.607.0 00	127	1.573.165. 000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.276.368. 600	27 9	0	0	401.481. 600	0	699.535. 800	0	1.172.634 .650	279	2.273.652. 050
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.663.638. 800	26 9	0	0	472.379. 100	0	767.337. 600	0	1.390.602 .900	269	2.630.319. 600
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	997.444.0 00	51	0	0	119.845. 000	0	295.662. 000	0	576.285.6 40	51	991.792.64 0
Evaluasi Kelurahan	50.000.00 0	3	0	0	10.770.0 00	6	1.406.50 0	3	30.555.50 0	12	42.732.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	280.000.0 00	0	0	0	18.250.0 00	10 0	201.900. 000	0	57.230.00 0	100	277.380.00 0

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuanga n	Fi sik	Keuangan		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.00 0	0	0	0	0	2	40.000.0 00	0	0	2	40.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.00 0	0	0	0	0	2	40.000.0 00	0	0	2	40.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.00 0	0	0	0	0	2	40.000.0 00	0	0	2	40.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.00 0	0	0	0	0	2	20.000.0 00	0	20.000.00 0	2	40.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.00 0	0	0	0	0	2	40.000.0 00	0	0	2	40.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	80.000.00 0	0	0	0	18.250.0 00	1	21.900.0 00	0	37.230.00 0	1	77.380.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	96.800.00 0	25	0	0	5.595.00 0	50	14.385.0 00	25	36.952.50 0	100	56.932.500
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	96.800.00 0	25	0	0	5.595.00 0	50	14.385.0 00	25	36.952.50 0	100	56.932.500

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Pagu	Realisasi (TW)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
		I		II		III		IV			
		Fis ik	Kuanga n	Fi sik	Kuanga n	Fi sik	Kuanga n	Fi sik	Kuangan		
<i>Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>											
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	96.800.00 0	3	0	0	5.595.00 0	6	14.385.0 00	3	36.952.50 0	12	56.932.500
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.800.00 0	25	0	0	1.800.00 0	50	8.699.50 0	25	9.599.500	100	20.099.000
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>56.800.00 0</i>	25	0	0	1.800.00 0	50	8.699.50 0	25	9.599.500	100	20.099.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56.800.00 0	3	0	0	1.800.00 0	6	8.699.50 0	3	9.599.500	12	20.099.000

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai bagian dari perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, yang menetapkan bahwa kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan memiliki tugas pokok untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di wilayahnya.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat selaku pimpinan kecamatan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola fungsi administrasi, termasuk perencanaan, kepegawaian, umum, dan keuangan, serta didukung oleh lima seksi teknis, yaitu:

1. Seksi Pemerintahan, yang melaksanakan kewenangan di bidang pemerintahan;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yang bertugas dalam urusan pemberdayaan masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial, yang menangani isu-isu sosial di masyarakat;

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, yang mengoordinasikan kegiatan pembangunan ekonomi wilayah;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Selain menjalankan tugas pokok, Camat juga memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain:

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat kecamatan;
- Koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan ketertiban umum;
- Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Wali Kota;

2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan Bekasi Selatan sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Tugas pokok Kecamatan Bekasi Selatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan perangkat daerah serta menyelenggarakan pelayanan umum yang menjadi kewenangan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan bertanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan.
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi pembangunan di wilayah kecamatan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

B. Fungsi Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan Bekasi Selatan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. **Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan**
Membantu kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memastikan koordinasi yang efektif antara kelurahan dan kecamatan.
2. **Pelaksanaan Pelayanan Administratif dan Pelayanan Publik**
Menyediakan layanan administratif kepada masyarakat, termasuk pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kecamatan.
3. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**
Mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan.
4. **Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
Bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, termasuk penanganan konflik sosial dan penegakan peraturan daerah.
5. **Pengelolaan Data Wilayah dan Informasi Pembangunan**
Mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data wilayah serta informasi pembangunan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
6. **Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kelurahan**
Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas kelurahan untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan program pemerintah daerah.
7. **Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Wali Kota**
Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

C. Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Selatan

Struktur organisasi Kecamatan Bekasi Selatan disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Struktur organisasi ini terdiri dari:

a. Camat

Sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan, Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi kecamatan serta menjadi perpanjangan tangan Wali Kota di wilayahnya.

b. Sekretariat Kecamatan

Dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, sekretariat bertugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bertanggung jawab atas urusan umum, kepegawaian, dan administrasi perkantoran.

- Subbagian Keuangan

Mengelola keuangan dan aset kecamatan, termasuk penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan.

c. Seksi-Seksi Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Camat secara teknis, dibentuk lima seksi dengan rincian sebagai berikut:

- Seksi Pemerintahan

Menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, pelaporan RT/RW, pemilu, dan pemantauan kebijakan tata kelola kelurahan.

- Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan pembangunan fisik di wilayah, pengawasan infrastruktur lingkungan, serta mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal dan pelaku UMKM di kecamatan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat, baik dalam sektor sosial, lingkungan, maupun ekonomi; serta penguatan lembaga kemasyarakatan seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK.
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Melaksanakan pengawasan wilayah, menyelesaikan gangguan ketertiban umum, memfasilitasi penanganan konflik sosial, dan berkoordinasi dengan Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
- Seksi Kesejahteraan Sosial
Bertugas menangani masalah kesejahteraan sosial, seperti penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, fasilitasi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pendampingan masyarakat rentan lainnya.

d. Kelurahan

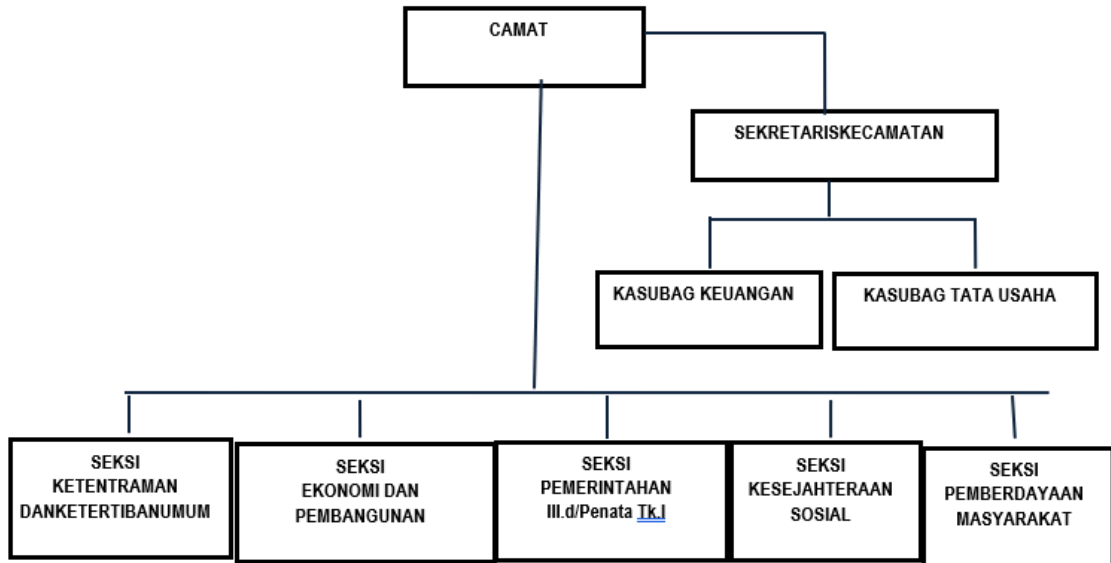
Kecamatan Bekasi Selatan membawahi lima kelurahan, yaitu: Kelurahan Jakasetia, Kelurahan Jakamulya, Kelurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kelurahan Margajaya. Setiap kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara optimal, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

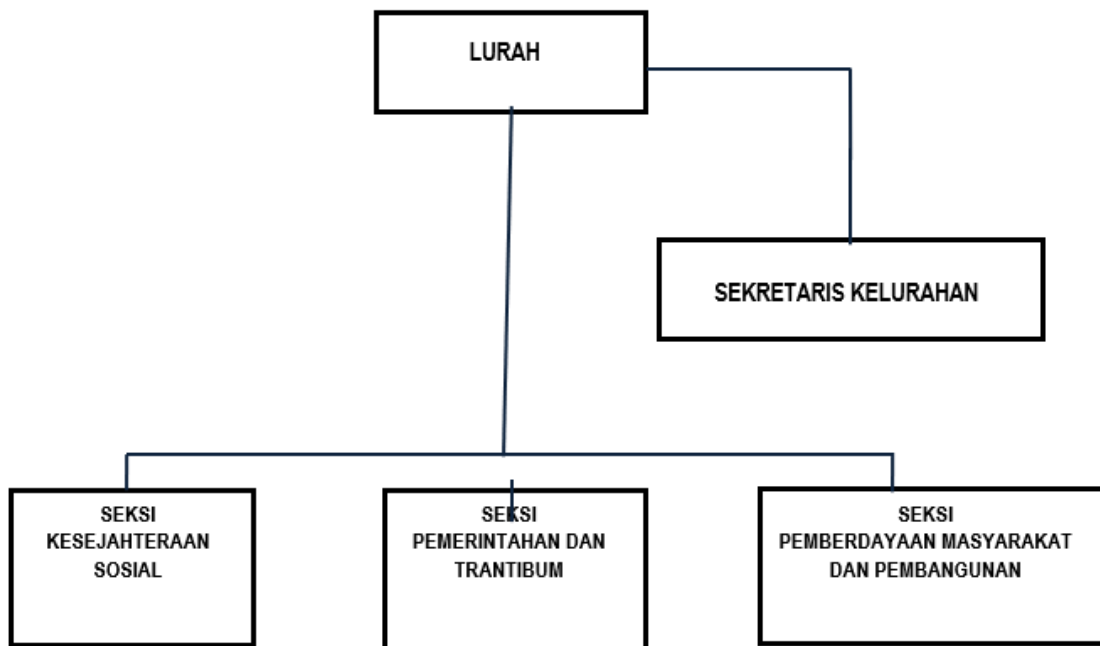
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BEKASI SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BEKASI SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bekasi Selatan

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya didasarkan pada sejumlah asumsi. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali ditemui berbagai permasalahan, kendala, dan tantangan, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan tugas di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Keterbatasan ini mencakup aspek kemampuan teknis maupun motivasi kerja. Padahal, kualitas dan kapasitas SDM sangat berpengaruh—baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian arah, tujuan, dan sasaran suatu instansi, yang pada akhirnya menentukan kelancaran serta percepatan pelaksanaan kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan yang membawahi lima (5) kelurahan, didukung oleh total 223 pegawai. Jumlah ini terdiri atas 46 PNS dan 177 pegawai non-PNS. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah aparatur yang ada saat ini terbilang memadai. Namun dari sisi kualitas, masih diperlukan tambahan SDM dengan keahlian dan latar belakang pendidikan tertentu, seperti Sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Statistik. Selengkapnya, data SDM Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan, dan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Perbulan Juli 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	ASN	185	106	79
2	Non-ASN	38	20	18
	Total	223	126	97

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Selatan Berdasarkan Pendidikan
Perbulan Juli 2025

N O	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	185	-	11	85	6	82	1	-
2	Non-ASN	38	-	-	5	-	33	-	-
	TOTAL	223		11	90	6	115	1	-

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bekasi Selatan

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Selatan Berdasarkan Golongan
Perbulan Juli 2025

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN						
			IX	VII	V	IV	III	II	I
1	PNS	46	-	-	-	4	32	10	-
2	PPPK	139	55	15	69	-	-	-	-
3	Non-ASN	38	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	223	55	15	69	4	33	10	-

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bekasi Selatan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan

Kinerja merupakan cerminan dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Adapun pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk menilai kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui pengukuran kinerja, instansi

pemerintah dapat mengidentifikasi capaian yang telah diraih, sekaligus mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program kerja.

Salah satu instrumen utama dalam pelaporan hasil pelaksanaan kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang menggambarkan sejauh mana kegiatan dan anggaran telah digunakan untuk menghasilkan output dan outcome yang direncanakan. Dalam konteks ini, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029 disusun tidak hanya sebagai pedoman pelaksanaan program kerja selama lima tahun ke depan, tetapi juga sebagai dasar dalam menetapkan tolok ukur kinerja dan target yang ingin dicapai.

Renstra ini memuat indikator-indikator kinerja utama yang menjadi alat ukur pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bekasi Selatan. Indikator tersebut akan menjadi rujukan dalam proses monitoring dan evaluasi berkala serta dalam penyusunan laporan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja baik di tingkat kegiatan maupun sasaran dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari penetapan indikator kinerja, penetapan target tahunan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi hasil.

Dengan adanya mekanisme pengukuran kinerja yang jelas dan terarah, maka implementasi Renstra Kecamatan Bekasi Selatan dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Hal ini juga sejalan dengan prinsip good governance serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing di tingkat kecamatan.

Standar Pelayanan Minimal dinilai dengan pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual dan e-kuesioner (tautan dan kode QR) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (Sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner yaitu:

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

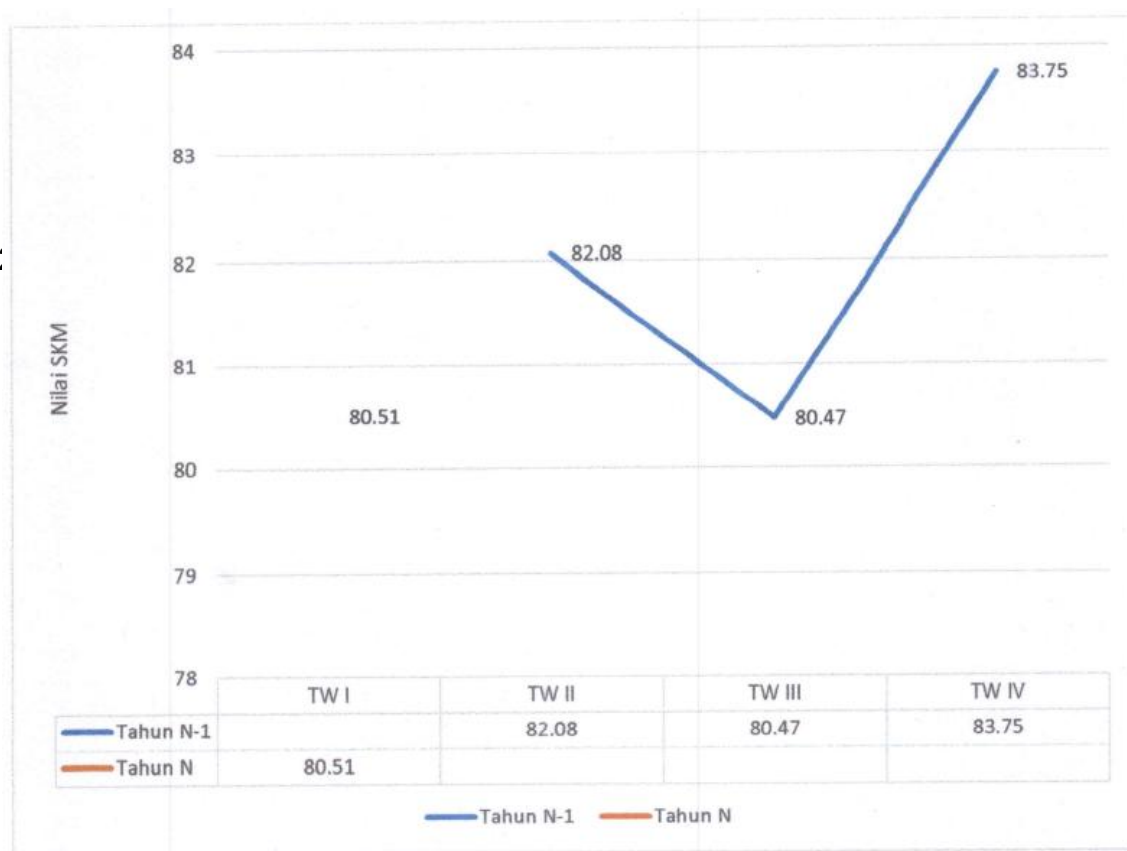
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tren Nilai SKM per Triwulan

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan dapat dilihat melalui grafik berikut:



Sumber: SKM Kecamatan Bekasi Selatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Kecamatan Bekasi Selatan terjadi penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 Triwulan I hingga tahun 2025 Triwulan I.

Kecamatan Bekasi Selatan memiliki standar dalam pelayanan yang ada, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses dalam pelayanan tersebut.

Berikut merupakan SOP pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan :

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)						
KECAMATAN BEKASI SELATAN						
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN		MUTU BAKU		
		KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima Berkas Dari Pemohon			Formulir Permohonan dari kelurahan	5 Menit	Dokumen lengkap
	b Menerima, memeriksa, meregistrasi dan mencetak pengantar permohonan KK dari kelengkapan berkas pemohon, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika berkas lengkap akan di proses lanjut			1 Pengantar RT/RW 2 Formulir permohonan KK dari Kelurahan 3 KTP dan Kartu Keluarga Lama 4 Surat Keterangan Pindah bagi Pendatang 5 Surat Nikah bagi yang baru berkeluarga 6 Akta Kelahiran Anak untuk Penambahan jiwa 7 Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian (Untuk yang kehilangan KTP) 8 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	30 Menit	Tercatat dalam register dokumen, dan KTP tercetak
2	Menerima dan memaraf pengantar permohonan KK yang sudah tercetak			KK Tercetak	3 Menit	KK diparaf
3	Menyerahkan KK yang sudah di paraf ke Pendudukan untuk di Tanda Tangan oleh Kadisduk Capil			KK yang sudah diparaf dikirim ke Disdukcapil untuk ditandatangani	1 Hari	KK yang sudah di paraf dikirim ke Disduk untuk di Tanda Tangan
						
4	Menerima info, mengambil KK yang sudah di cetak ke Disdukcapil, menandatangani tanda terima dan melaporkan kepada Kasi Pemerintahan			Tanda terima KK	1 Jam	KK sudah di Tanda Tangan Kadisdukcapil
						
5	Kasi Pemerintahan mengecek dan memerintahkan pelaksana untuk menginfokan ke kelurahan untuk mengambil dan mendistribusikan kepada pemohon			KK yang sudah di Tanda Tangan Kadisdukcapil diambil oleh pihak kelurahan dan di distribusikan ke pemohon	Relatif	KK diterima oleh pemohon

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR AKTA KELAHIRAN							
KECAMATAN BEKASI SELATAN							
NO	URAIAN PROSEDUR				MUTU BAKU		
		CAMAT	KASI	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima kelengkapan berkas				Formulir Permohonan	5 Menit	
	b Menerima, memeriksa dan meragistrasi permohonan dari kelengkapan berkas tersebut, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika berkas lengkap akan di proses lanjut				1 Pengantar RT/RW 2 Formulir permohonan Akta Lahir dari Kelurahan 3 FC KTP Suami Istri FC Kartu Keluarga 4 FC Surat Nikah 5 Surat Keterangan Lahir dari Bidan atau 6 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Meneliti dan memaraf formulir permohonan akta kelahiran				Permohonan akta kelahiran yang telah diregister	11 Menit	Permohonan akta kelahiran diparaf
3	Menandatangani pengantar akta kelahiran				Permohonan akta kelahiran diparaf		pengantar akta kelahiran diketahui Camat
4	Formulir pengantar akta kelahiran yang telah di tandatangani diterima pemohon				Pengantar Akta kelahiran ditandatangani Lurah dan Camat	3 Menit	dan akan diproses ke Disdukcapil untuk pencetakan Akta kelahiran

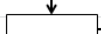
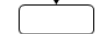
Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)								
KECAMATAN BEKASI SELATAN								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang telah ditandatangani Lurah setempat					1 KTP 2 KK	5 Menit	Surat Masuk
	b Meneliti,Memeriksa kelengkapan berkas dan rekomendasi SKTM dari Kelurahan, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan lagi kepemohon, bila berkas lengkap akan di proses Lanjut					1 Fotocopy KTP, KK 2 Pengantar dari RT, Rw 3 Pengantar dari Puskesmas 4 Surat Rekomendasi Kelurahan (SKTM)	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan penerbitan surat pengesahan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen pemohon	3 Menit	SKTM Terparaf Kasi Kesos
3	Memaraf SKTM yang telah diparaf kasi Kesos					Dokumen permohonan/SKTM lengkap terparaf Kasi Kesos	3 Menit	SKTM Terparaf Sekcam
4	Menandatangani SKTM yang telah diparaf kasi Kesos dan Sekcam					SKTM yang sudah di paraf	3 Menit	SKTM
5	Menerima, meregistrasi mengarsipkan dan memberikan kepada pemohon					Tertandatangani Camat	4 Menit	SKTM diterima pemohon

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN									
NO		URAIAN PROSEDUR					MUTU BAKU		
			CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a	Menerima berkas setelah melakukan kepengurusan Izin peruntukan Penggunaan Lahan berikut rekomendasinya					Dokumen permohonan	5 Menit	Berkas Persyaratan Pengurusan Izin
	b	Memeriksa, memberi ceklis kelengkapan berkas dan meceat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Luas bangunan yang di mohon dari Gambar rencana bangunan dan rekomendasi IPPL							
	c	Menyampaikan kepada Ka. UPTD PUPR Kecamatan							
2	a	Menerima Berita Acara Teknis dari Ka. UPTD PBFB (Distaru) Kecamatan disetujui atau tidak disetujui, jika disetujui disampaikan ke kasi ekbang jika tidak disetujui dibuat surat penolakan disampaikan kepada pemohon.					1 Foto copy KTP Pemohon	20 Menit	Dokumen permohonan lengkap dan Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Peta Situasi Tercetak
	b	Menelaah, mencatat					2 Foto copy Sertifikat Kepemilikan Tanah 3 Foto copy PBB Tahun Berjalan 4 Rekomendasi IPPL (UPTD PBFB) 5 Gambar Rencana Bangunan (UPTD PBFB) 6 Izin Peruntukan Penggunaan lahan		
3		Memeriksa dan menandatangani BA dan gambar bangunan, memerintahkan pelaksana untuk mempersiapkan nota perhitungan dan mencetak draf IMB					SSPD	1 Hari	Tanda Terima Pembayaran Pajak
4	a	Mengiaskan nota perhitungan dan draf IMB					Bukti Pembayaran	5 Menit	Tanda Lunas Pembayaran Pajak
	b	Menerima bukti pembayaran retribusi IMB dari pemohon							
5		Memeriksa dan memaraf draf IMB					Dokumen permohonan lengkap	10 Menit	Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terparaf dan Gambar Rencana Bangunan serta Peta situasi Tertanda tangan
6		Memeriksa dan memaraf draf IMB					Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diparaf kasi Ekbang	5 Menit	Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terparaf
7		Memeriksa dan menandatangani draf IMB					Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diparaf kasi Ekbang dan Sekcam	5 Menit	Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertandatangani dan Gambar Rencana Bangunan Tertanda tangan
8		Memberi Nomor IMB, menyampaikan kepada pemohon mengarsipkan IMB					Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Gambar Rencana Bangunan serta Peta situasi Tertanda tangan dari teregister Arsip sesuai dengan kewenangan IMB	5 Menit	Izin Mendirikan Bangunan

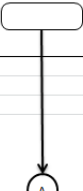
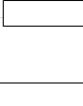
Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PERMOHONAN PERALIHAN HAK TANAH KECAMATAN BEKASI SELATAN							
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN		MUTU BAKU			
		CAMAT/PPAT	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a Menerima berkas permohonan Akta Peralihan Hak Tanah			Kelengkapan Berkas permohonan	10 Menit		
	b Menerima, memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke Pemohon dan bila lengkap akan di proses lanjut dengan Pengetikan Akta Peralihan Hak Tanah dan menginput/validasi dengan menggunakan E-BPHTB yang akan menentukan harga pajak tanah lalu diserahkan kembali ke pemohon untuk dilengkapi tandatangan penjual, pembeli dan saksi - saksi serta wajib membayar pajak penjual dan pajak pembeli keDISPENSA setelah dibayar pajak tersebut lalu Akta di ajukan ke Sekel danLurah setempat untuk ditandatangani			1 Foto Copy KTP Suami dan Istri 2 Foto Copy KK 3 Surat Bukti Kepemilikan Tanah 4 SPPT PBB 10 Tahun terakhir lunas dibayar 5 Foto Copy KTP Pembeli 6 Foto Copy NPWP Penjual dan Pembeli 7 Surat Pernyataan Ahli Waris 8 Surat Kematian Penjual (bila meninggal)	10 Menit	Tercetak Dokumen Akta Peralihan Hak Tanah dan Pajak penjual, pajak pembeli	
2	Menerima Akta dengan kelengkapan tandatangan yang dibutuhkan serta melampirkan bukti pembayaran Pajak penjual dan pembeli			Dokumen Jelas dan Lengkap	10 Menit	Dokumen Jelas dan Lengkap serta bukti pembayaran pajak	
3	Menandatangani Akta Peralihan Hak Tanah			Dokumen Jelas dan Lengkap	5 Menit	Dokumen Jelas dan Lengkap	
4	Registrasi Dokumen dan pengarsipan Akta Peralihan Hak Tanah, BPHTB, SSP dan SSPD dan menyerahkannya kepada pemohon			Dokumen Akta Peralihan Hak Tanah Teregistrasi dan tersipkan	30 Menit	Akta Peralihan Hak Tanah Diterima	

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN:(SKCK) KECAMATAN BEKASI SELATAN								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRAMTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima Kelengkapan Berkas permohonan					Formulir Permohonan Dari Kelurahan (Surat Pengantar)	30 Menit	Dokumen permohonan lengkap
	b Menerima Surat Pengantar dari kelurahan dan memeriksanya, bila tidak lengkap berkas akan dikembalikan lagi ke pemohon, bila lengkap akan diproses lanjut					1 Foto Copy KTP 2 Foto Copy KK 3 Pengantar RT, Rw / Kelurahan	10 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menerima dan memberi paraf pada Surat Pengantar SKCK yang telah di tandatangi Lurah setempat, jika tidak sama / disetujui maka dikembalikan ke pelaksana jika disetujui maka di paraf					Dokumen pemohon dengan tandatangan Lurah Setempat pada Surat Pengantar SKCK	10 Menit	Surat Pengantar SKCK telah di paraf Kasi Tramtib
3	Menerima dan memberi paraf pada Sura Pengantar SKCK, yang telah diparaf Kasi Tramtib					Dokumen Lengkap	5 Menit	Surat Pengantar SKCK telah di paraf Sekcam
4	Menerima dan memberi Tandatangan pada Sura Pengantar SKCK, yang telah di paraf kasi tramtib dan Sekcam					Dokumen Lengkap	5 Menit	Surat Pengantar SKCK telah ditandatangani Camat
5	Menerima, memberi nomor Registrasi, Mengarsipkannya dan memberi Surat pengantar SKCK kepada pemohon					Surat pengantar SKCK Tandatangan Camat	4 Menit	SKCK yang telah diterima oleh pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kapolsek /Kapolres

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA/PERUSAHAAN								
NO	URAIAN PROSEDUR						MUTU BAKU	
		CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima Berkas Pengajuan Domisili Usaha					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
	b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Bila berkas yang diajukan tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi ke pemohon, apabila berkas tersebut lengkap akan di dibuat/ di Cetak Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan dan pemohon menandatangani Surat Keterangan Domisili Usaha					1 Pengantar RT/RW 2 Foto copy KTP Pemohon 3 Akte Pendirian Perusahaan 4 Foto copy PBB Tahun Berjalan 5 Ijin tetangga bagi usaha dengan resiko tinggi	20 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Memeriksa Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU yang Sudah dibuat/diCetak berikut Kelengkapannya dan di bubuhkan paraf					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 menit	SKDU terparaf Kasi ekbang
3	Berkas SKDU yang sudah diparaf kasi ekbang kecamatan diajukan ke sekretaris kecamatan untuk dibubuhkan paraf kembali					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 Menit	SKDU terparaf Sekcam
4	Menerima Berkas Domisili Usaha dan memberi Tanda Tangan					Berkas SKDU paraf Kasi Ekbang dan Sekcam	5 Menit	SKDU telah ditanda tangan Camat
5	Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan akan di Register arsip dan diberikan kembali kepada pemohon					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan yang sudah diketahui / ditanda tangani dan di register	5 Menit	Surat Keterangan Domisili Usaha di terima Pemohon (dijanjutkan untuk pengurusan Perijinan selanjutnya)

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERAKAMAN KTP ELEKTRONIK / e-KTP KECAMATAN BEKASI SELATAN						
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN		MUTU BAKU		OUTPUT
		KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	a Menerima kelengkapan berkas permohonan			Dokumen lengkap	5 Menit	Dokumen lengkap
	b memeriksa berkas tersebut, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan permohonan, jika berkas lengkap akan di proses Perekaman data diri yang langsung masuk ke data base Kemendagri			1 Pengantar RT/RW 2 KTP atau KK 3 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	15 Menit	Hasil Perekaman Data diri dikirim melalui Jaringan Satelit untuk proses pencetakan e-KTP oleh pihak Kemendagri
2	Menerima e-KTP yang telah jadi untuk didata sesuai dengan jumlah yang ada di konsorium			KTP el yang sudah tercetak	30 Menit	Konsorium/ tanda terima pengiriman
3	Penandatanganan Tandatenerima Konsorium dari Kemendagri			Konsorium/ tandatenerima pengiriman	30 Menit	Konsorium/ tanda terima pengiriman yang telah di tandatangani
4	Menyerahkan E-ktip ke Kelurahan untuk didistribusikan ke pemohon melalui RT/RW			KTP el yang sudah tercetak	5 menit	Tanda terima / berita acara kasi pemerintahan Kelurahan

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT DOMISILI YAYASAN, KLINIK, DAN SEKOLAH (PA'UD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA) KECAMATAN BEKASI SELATAN								
NO	URAIAN PROSEDUR					MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a Menerima berkas Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Fomulir Permohonan	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
	b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah engkap akan dikembalikan kepada pemohon, bila lengkap akan di proses lanjut					1 Pengantar RT/RW 2 Fotocopy KTP 3 Surat Akta Pendirian 4 Surat Akta Notaris 5 Ijin Tetangga 6 Surat Kepemilikan/Status Tanah 7 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB 8 Rekomendasi Dari lembaga Terkait 9 Surat Domisili dari	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah yang telah ditandatangani Lurah setempat jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf
3	Pemarafan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Dokumen pemohon lengkap	3 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf
4	Penandatanganan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Rekomendasi telah di paraf	3 Menit	Rekomendasi telah ditandatangani
5	Menerima, meregister, mengarsipkannya Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah dan memberikannya kepada pemohon					Dokumen diberikan kepada Pemo	4 Menit	Rekom diterima untuk diproses lebih lanjut ke Dinas terkait

Gambar 2
SOP Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan Perda Kota Bekasi nomor: 7 Tahun 2016, Kecamatan Bekasi Selatan terbentuk, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota nomor: 92 Tahun 2016, Kedudukan, Susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan di Kota Bekasi diatur. Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan ditujukan untuk menyelesaikan dan meminimalisir terjadinya permasalahan di wilayah kerja.

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan di Kecamatan Bekasi Selatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal merupakan permasalahan yang timbul dari dalam organisasi, sementara eksternal merupakan permasalahan yang timbul dari luar organisasi. Berikut pemetaan permasalahan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan yang tertuang pada tabel TB-35

Tabel 2.6
Permasalahan Kecamatan Bekasi Selatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Sarana dan Prasarana eksisting yang sudah usang atau belum tersedia	Sarana dan prasarana eksisting yang sudah usang atau belum tersedia	- Pemeliharaan infrastruktur tidak rutin - Keterbatasan anggaran belanja modal - Usulan pengadaan belum menjadi prioritas anggaran kota
2	Permohonan permintaan ASN atau pendidikan sesuai tugas dan fungsi belum terpenuhi	Permohonan permintaan ASN atau pendidikan sesuai tugas dan fungsi belum terpenuhi	- Terbatasnya formasi ASN dari pusat - Tidak meratanya distribusi pegawai antar wilayah - Rendahnya prioritas pelatihan teknis berdasarkan kebutuhan spesifik unit

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3	Pembangunan Infrastruktur dan Aspirasi Masyarakat yang Belum Terakomodir Seluruhnya.	Pembangunan infrastruktur dan aspirasi masyarakat yang belum terakomodir seluruhnya	- Keterbatasan anggaran DPA dan belanja langsung - Proses Musrenbang belum sepenuhnya mengakomodasi usulan - Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
4	Belum tersedianya data utama sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Belum tersedianya data utama sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	- Belum optimalnya sistem informasi berbasis data sektoral - Minimnya integrasi data antar kelurahan dan kecamatan - Rendahnya budaya pendokumentasian kegiatan
5	Kurangnya fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat	Kurangnya fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat	- Minimnya dukungan program pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah - Belum teridentifikasi potensi unggulan lokal secara optimal
6	Bantuan operasional yang cenderung lambat terdistribusikan	Bantuan operasional yang cenderung lambat terdistribusikan	- Prosedur administrasi yang berjenjang dan lambat - Koordinasi lintas OPD belum optimal - Keterlambatan pengesahan anggaran atau pencairan dana
7	Banjir di wilayah bantaran kali Bekasi	Limpasan Debit Air Sungai dari Hulu	- Pendangkalan sungai dan buruknya drainase - Permukiman padat di bantaran sungai - Kurangnya kegiatan normalisasi dan mitigasi lingkungan
8	Intensitas sinergitas forkopimcam yang masih kurang	Intensitas sinergitas Forkopimcam yang masih kurang	- Jadwal koordinasi belum terstruktur - Belum adanya forum formal berkala

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			- Ego sektoral antar lembaga belum sepenuhnya diatasi
9	Intensitas penyuluhan wawasan kebangsaan yang kurang	Intensitas penyuluhan wawasan kebangsaan yang kurang	- Minimnya program penyuluhan dari OPD teknis - Kegiatan sosialisasi belum menjadi prioritas - Kurangnya partisipasi tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan
10	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang seharusnya telah mengatur mengenai sanksi belum dapat ditegakkan sesuai klausul yang telah tertuang.	Perda No. 10 Tahun 2011 dan Perda No. 11 Tahun 2015 belum ditegakkan sesuai klausul	- Rendahnya penegakan hukum di lapangan - Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat - Keterbatasan personel pengawasan dan sanksi yang tidak konsisten

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung pelayanan publik yang prima, Kecamatan Bekasi Selatan mengidentifikasi sejumlah faktor strategis yang menjadi fokus pembenahan organisasi di masa mendatang. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan merupakan dasar penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian tugas yang proporsional, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur untuk setiap jenis pelayanan, serta penerapan prinsip desentralisasi yang bertanggung jawab, sangat

menentukan kelancaran dan kecepatan pengambilan keputusan. Penataan kelembagaan yang tepat akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) Kualitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah memiliki peran sentral sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia secara profesional menjadi prioritas utama. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian, mutasi, kehadiran, hingga sistem penggajian melalui aplikasi digital diharapkan dapat menciptakan tata kelola SDM yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

c) Sistem Pelayanan Publik

Untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik maladministrasi, diperlukan sistem pelayanan publik yang tertata baik. Transparansi dalam prosedur, kejelasan waktu penyelesaian, serta tarif pelayanan yang dapat diakses publik merupakan bentuk nyata akuntabilitas birokrasi. Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi atau *e-government* menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.

d) Motivasi Kerja Aparatur

Motivasi kerja yang tinggi dari aparatur pemerintah merupakan prasyarat utama dalam menciptakan pelayanan yang tulus dan profesional. Perilaku yang ramah, responsif, serta kesediaan untuk melayani tanpa pamrih merupakan indikator utama pelayanan publik yang berkualitas. Kecamatan Bekasi Selatan berkomitmen untuk mendukung implementasi pelayanan berbasis teknologi informasi sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dalam rangka menciptakan pelayanan yang efisien dan transparan.

e) Kemampuan Teknis Aparatur

Kecakapan teknis aparatur menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Aparatur yang memiliki kemampuan dan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pemahaman tugas yang baik dapat meminimalkan kesalahan dalam pelayanan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

f) **Pengawasan dan Kontrol Sosial**

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Kecamatan Bekasi Selatan akan memperkuat fungsi edukasi publik terkait informasi layanan seperti persyaratan, waktu proses, dan alur prosedur. Hal ini diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

g) **Etika dan Disiplin Aparatur**

Perilaku disiplin dari seluruh aparatur, baik dalam hal waktu kerja, tata kelola data, maupun sikap dalam memberikan pelayanan, merupakan faktor fundamental dalam menciptakan birokrasi yang profesional. Disiplin kerja yang tinggi akan mempercepat proses pelayanan serta menjamin keakuratan dokumentasi untuk kebutuhan pelayanan ke depan.

h) **Komunikasi Internal dan Iklim Organisasi**

Efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kelancaran komunikasi baik secara vertikal antar atasan dan bawahan maupun horizontal antar unit kerja. Penyampaian informasi yang tepat, disposisi yang sesuai sasaran, serta koordinasi lintas seksi menjadi kunci dalam menjaga sinergi antar bagian dalam organisasi.

i) **Evaluasi dan Restrukturisasi Organisasi**

Sebagai bagian dari pembenahan berkelanjutan, Kecamatan Bekasi Selatan berkomitmen melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur secara periodik. Mapping kompetensi dan minat (passion) akan menjadi dasar penempatan aparatur pada unit kerja yang sesuai. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi individu dalam mendukung pelayanan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis dan permasalahan pada Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Isu Strategis dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Selatan

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
1	Pemeliharaan infrastruktur tidak rutin	Sarana dan prasarana eksisting yang sudah usang atau belum tersedia	Sarana dan Prasarana eksisting yang sudah usang atau belum tersedia	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang layak dan memadai	Peningkatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Keterbatasan anggaran belanja modal					
	Usulan pengadaan belum menjadi prioritas anggaran kota					
2	Terbatasnya formasi ASN dari pusat	Permohonan permintaan ASN atau pendidikan sesuai tugas dan fungsi belum terpenuhi	Permohonan permintaan ASN atau pendidikan sesuai tugas dan fungsi belum terpenuhi	Kekurangan ASN dan rendahnya kompetensi aparatur sesuai kebutuhan unit kerja	Pemenuhan kebutuhan ASN dan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis fungsional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak meratanya distribusi pegawai antar wilayah					
	Rendahnya prioritas pelatihan teknis berdasarkan kebutuhan spesifik unit					
3	Keterbatasan anggaran DPA dan belanja langsung	Pembangunan infrastruktur dan aspirasi masyarakat yang belum	Pembangunan Infrastruktur dan Aspirasi Masyarakat yang Belum	Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodir	Penguatan mekanisme perencanaan partisipatif dan peningkatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Proses Musrenbang belum sepenuhnya					

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
	mengakomodasi usulan	terakomodir seluruhnya	Terakomodir Seluruhnya.	dalam pembangunan wilayah	alokasi anggaran untuk program prioritas masyarakat	
	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan					
4	Belum optimalnya sistem informasi berbasis data sektoral	Belum tersedianya data utama sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Belum tersedianya data utama sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Lemahnya basis data dan sistem informasi pembangunan di tingkat kecamatan	Pengembangan sistem informasi data sektoral dan integrasi data kelurahan-kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Minimnya integrasi data antar kelurahan dan kecamatan					
	Rendahnya budaya pendokumentasian kegiatan					
5	Minimnya dukungan program pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah	Kurangnya fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat	Kurangnya fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat	Minimnya dukungan fasilitas pemberdayaan ekonomi lokal	Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Belum teridentifikasi potensi unggulan lokal secara optimal					
6	Prosedur administrasi yang berjenjang dan lambat	Bantuan operasional yang cenderung lambat terdistribusikan	Bantuan operasional yang cenderung lambat terdistribusikan	Keterlambatan distribusi bantuan operasional kegiatan	Percepatan dan penyederhanaan proses penyaluran bantuan operasional serta	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Koordinasi lintas OPD belum optimal					

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
	Keterlambatan pengesahan anggaran atau pencairan dana			kecamatan dan kelurahan	peningkatan koordinasi lintas OPD	
7	Pendangkalan sungai dan buruknya drainase	Limpasan Debit Air Sungai dari Hulu	Banjir di wilayah bantaran kali Bekasi	Ancaman banjir akibat limpasan air dari hulu sungai dan buruknya drainase	Program penanganan banjir terintegrasi melalui normalisasi saluran, edukasi lingkungan, dan sinergi dengan OPD teknis	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Permukiman padat di bantaran sungai					
	Kurangnya kegiatan normalisasi dan mitigasi lingkungan					
8	Jadwal koordinasi belum terstruktur	Intensitas sinergitas Forkopimcam yang masih kurang	Intensitas sinergitas forkopimcam yang masih kurang	Lemahnya koordinasi lintas instansi kewilayahan (Forkopimcam)	Penguatan koordinasi Forkopimcam melalui forum reguler dan sistem komunikasi terpadu	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Belum adanya forum formal berkala					
	Ego sektoral antar lembaga belum sepenuhnya diatasi					
9	Minimnya program penyuluhan dari OPD teknis	Intensitas penyuluhan wawasan kebangsaan yang kurang	Intensitas penyuluhan wawasan kebangsaan yang kurang	Rendahnya intensitas penyuluhan wawasan kebangsaan dan nilai kebinekaan	Program penyuluhan kebangsaan secara rutin di masyarakat dan lembaga pendidikan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Kegiatan sosialisasi belum menjadi prioritas					
	Kurangnya partisipasi tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan					

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
10	Rendahnya penegakan hukum di lapangan	Perda No. 10 Tahun 2011 dan Perda No. 11 Tahun 2015 belum ditegakkan sesuai klausul	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang seharusnya telah mengatur mengenai sanksi belum dapat ditegakkan sesuai klausul yang telah tertuang.	Lemahnya implementasi penegakan Perda Ketertiban Umum dan Penataan PKL	Peningkatan sosialisasi Perda, pelatihan aparat pengawas, dan penerapan sanksi yang konsisten dan adil	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat					
	Keterbatasan personel pengawasan dan sanksi yang tidak konsisten					

2.3 Telaahan

2.3.1 Telaahan Terhadap RPJMD Kota Bekasi

Tabel 2.7
Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
Visi: “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” Misi: 1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan	Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
		Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern		Pilar Infrastruktur (IDSD)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Gerakan Kobe Hijau

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
yang semakin memuaskannya dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani,			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya cadangan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Peningkatan Cadangan Lahan	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Gerakan Kobe Sehat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
yang semakin kondusif dan berkelanjutan 3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi			penyediaan air minum	terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	V/C Rasio	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Gerakan Kobe Hijau
		Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Gerakan Kobe Hijau

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha				s Udara	Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Capaian RTH/Taman Hutan Kota yang Terkelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Perkotaan Rawan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Gerakan Kobe Hijau
		Terwujudnya resiliensi terhadap		Indeks Risiko Bencana		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
yang berkeadilan rakyat 5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional		bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Gerakan Kobe Hijau
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Gerakan Kobe Hijau
	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya,			Indeks Pembangunan Manusia		
		Terwujudnya pendidikan		▪ Skor Literasi/Numerasi		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
al yang keren	humanis dan harmonis	masyarakat yang berkualitas dan merata		▪Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	•Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan (APS) •Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) •Persentase Anak Usia	Program Pengelolaan Pendidikan	Gerakan Kobe Cerdas

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan (APS)		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	•Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik •Rasio Terpenuhi ya Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Gerakan Kobe Cerdas

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Gerakan Kobe Cerdas
		Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	•Persentase Kematian Ibu •Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Gerakan Kobe Sehat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
					Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Gerakan Kobe Sehat
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	• Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani • Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Program Kawasan Permukiman	Gerakan Kobe Sehat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya partisipasi masyarakat olahraga dan peningkatan prestasi olahraga	▪ Jumlah Atlet/Pelatih yang Berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional ▪ Jumlah Event Olahraga di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Gerakan Kobe Sehat
		Terwujudnya		Indeks Pembangunan Keluarga		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		ketangguhan keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Tingkat Kelurahan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Gerakan Kobe Bersinergi
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	•Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/<i>Modern Contraceptive</i> (mCPR) •Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Gerakan Kobe Bersinergi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)		
			Meningkatnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas	•Dimensi Kebahagiaan •Dimensi Kemandirian •Dimensi Ketenteraman	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Gerakan Kobe Bersiner gi
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Gerakan Kobe Bersiner gi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		Terwujudnya kesetaraan gender		Indeks Ketimpangan Gender		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Dibina	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Gerakan Kobe Bersinergi
		Terwujudnya pemenuhan hak anak		Nilai Kota Layak Anak		
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Gerakan Kobe Bersinergi
		Terwujudnya		Indeks Pembangunan		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		masyarakat yang berbudaya maju		an Kebudayaan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan	Gerakan Kobe Menarik
	Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif			PDRB Per Kapita		
		Terwujudnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan dan industri		• Proporsi PDRB Perdagangan • Proporsi PDRD Industri Pengolahan		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya tata kelola perdagangan ekspor	Persentase Surat Keterangan Asal yang Diterbitkan	Program Pengembangan Ekspor	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya nilai tambah sektor industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang Difasilitasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Informal yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Gerakan Kobe Berkarya
			Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM	Gerakan Kobe Berkarya

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital		• Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum • Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	• Persentase Kawasan Wisata yang Ditata • Persentase Peningkatan Kepatuhan Usaha Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Gerakan Kobe Menarik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Gerakan Kobe Menarik
			Meningkatnya kapasitas SDM ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Gerakan Kobe Berkarya
		Terwujudnya ketahanan pangan kota		Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan	▪ Skor Pola Pangan Harapan	Program Diversifikasi dan Ketahanan	Gerakan Kobe Berkarya

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			pangan masyarakat	▪ Persentase Ketersediaan Pangan	Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan masyarakat	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Gerakan Kobe Berkarya
	Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			Indeks Daya Saing Daerah		
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Dinamisme Bisnis		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh	Program Pelayanan Penanaman Modal	Gerakan Kobe Menarik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Izin Sesuai Ketentuan		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Gerakan Kobe Menarik
		Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat		Indeks Harmoni Indonesia		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtrans	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Gerakan Kobe Bersinergi
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Gerakan Kobe Bersinergi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Ekonomi dan Sosial Budaya	Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Ekonomi dan Sosial Budaya	
		Terwujudnya kerja sama kota yang efektif		Efektivitas Kerja Sama Kota		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama kota	Efektivitas Kerja Sama Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gerakan Kobe Menarik
		Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya produktivitas dan kompetensi tenaga kerja	•Persentase Tenaga Kerja yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Gerakan Kobe Berkarya

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				•Persentase Peningkatan Kompetensi Bagi Pencari Kerja		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Gerakan Kobe Berkarya
	Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian yang adaptif dan responsif	Nilai Survei Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	•Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital •Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak •Persentase Kepemilikan KTP	Program Pendaftaran Penduduk	Gerakan Kobe Berkinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				•Persentase Kepemilikan KK		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	•Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran •Persentase Kepemilikan Akte Kematian •Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan	Program Pencatatan Sipil	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam mendukung	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Gerakan Kobe Berkinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			pelayanan publik			
			Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	• Profil Kelurahan yang terbaharui • Persentase LKM yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Gerakan Kobe Bersiner gi, Gerakan Kobe Berkinerja, Gerakan Kobe Sehat
			Meningkatnya Dukungan	Persentase Fasilitas	Program Dukungan	Gerakan Kobe

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Berkinerja
				Nilai SAKIP		
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan		
				Nilai SPIP		
			Meningkatnya pemanfaatan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Komponen Perencanaan Kinerja	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya pengelolaan	• Persentase laporan keuangan	Program Pengelolaan	Gerakan Kobe

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			keuangan daerah	PD dengan kategori baik • Ketepatan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD • Persentase penyerapan belanja daerah • Persentase kebutuhan penggunaan belanja tak terduga	Keuangan Daerah	Berkinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				dengan yang ditetapkan		
			Meningkatnya pengelolaan aset daerah	• Persentase penatausahaan BMD sesuai peraturan • Persentase penyelesaian usulan penggunaan dan pemanfaatan BMD • Persentase penyelesaian usulan pemindaht	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Gerakan Kobe Berkinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				anganan, pemusnahan dan penghapusan BMD Persentase pengamanan BMD		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Gerakan Kobe Berkinerja
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindaklanjut Atas Rekomendasi Hasil	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Gerakan Kobe Berkinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Pemeriksaan Eksternal		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Gerakan Kobe Berkinerja
		Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas		Indeks Kota Cerdas		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Gerakan Kobe Berkinerja

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kecamatan Bekasi Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan mengampu sejumlah outcome utama, yaitu: meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKM) yang mendukung pelayanan publik, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Outcome-outcome ini langsung berkaitan dengan dua misi penting Pemerintah Kota Bekasi, yakni Misi 1 dan Misi 5.

Meningkatnya Peran LKM dalam Pelayanan Publik, program pemberdayaan masyarakat, pembinaan RT/RW, serta pelatihan dan fasilitasi LKM menjadi bagian integral dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif. LKM yang aktif dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat, menyampaikan aspirasi, serta ikut dalam proses pengawasan sosial. Ini mendukung cita-cita Kota Bekasi menjadi kota yang dikelola secara kolaboratif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial. Hal tersebut relevan dengan Misi 1 yaitu Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat, fokus utama program kecamatan adalah transformasi pelayanan publik menuju sistem yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Ini selaras dengan Misi 5 Kota Bekasi yang menekankan pentingnya penguatan manajemen pemerintahan dan kolaborasi strategis untuk menuju kota yang modern dan bertaraf internasional. Kecamatan Bekasi Selatan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dijabarkan dalam program penguatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja, peningkatan kapasitas perencanaan, serta penerapan prinsip good governance di lingkungan kecamatan. Dengan meningkatkan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Kecamatan Bekasi Selatan tidak hanya memperbaiki sistem kerja internal, tetapi juga memberikan kontribusi langsung pada akuntabilitas pemerintahan kota secara keseluruhan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dengan menyelaraskan program prioritasnya terhadap outcome dan misi kota, Kecamatan Bekasi Selatan membuktikan perannya sebagai perangkat daerah kewilayahan yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Bekasi secara holistik dan berkelanjutan.

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Gambar 3
Program Prioritas Presiden Republik Indonesia

Program prioritas Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 menekankan pada penguatan ketahanan nasional, pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan wilayah melalui pendekatan yang inklusif, progresif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks ini, Kecamatan Bekasi Selatan sebagai bagian dari pemerintahan tingkat lokal turut

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

memainkan peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Salah satu program prioritas nasional adalah penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sistem perlindungan sosial, sebagaimana tercermin dalam Program Hasil Terbaik Cepat poin 5, yaitu perluasan program kartu-kartu kesejahteraan sosial dan bantuan untuk usaha produktif. Hal ini sejalan dengan peran Kecamatan Bekasi Selatan dalam mendukung distribusi bantuan sosial dan pelayanan administrasi kependudukan yang diperlukan sebagai syarat utama penerima bantuan. Kecamatan juga berperan dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi warga, terutama melalui penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKM) dan kolaborasi dengan pelaku UMKM lokal.

Program Presiden dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan juga sangat relevan dengan outcome yang diampu Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu meningkatnya efektivitas pelayanan publik. Kecamatan menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi layanan dasar seperti BPJS, kartu identitas anak, dan pengelolaan administrasi pendidikan. Kecamatan juga turut mendukung penyuluhan kesehatan masyarakat bekerja sama dengan puskesmas serta kegiatan edukasi kesehatan lingkungan.

Program nasional terkait penguatan ketertiban umum dan pemberantasan korupsi, narkoba, serta perlindungan perempuan dan anak sangat berkesesuaian dengan kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan dalam mendukung ketertiban wilayah dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda, pengawasan PKL, dan pembinaan masyarakat. Kecamatan sebagai simpul koordinasi unsur Tiga Pilar (Polsek, Koramil, dan Pemerintah Daerah) memfasilitasi pembinaan keamanan lingkungan, kegiatan posyandu, forum anak, serta sosialisasi anti-narkoba.

Dalam bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian bencana, seperti banjir dan kerusakan sempadan sungai yang menjadi isu penting di wilayah Bekasi Selatan, program nasional yang menitikberatkan pada konservasi dan pengendalian ruang (RTH, drainase, dan air limbah) dijalankan melalui kolaborasi antar instansi. Kecamatan berperan dalam pemantauan wilayah rawan banjir, kegiatan bersih lingkungan, serta pendataan kawasan kumuh dan drainase.

Terakhir, seiring dengan program Presiden dalam penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, Kecamatan Bekasi Selatan telah menunjukkan komitmen melalui peningkatan nilai AKIP, digitalisasi pelayanan administrasi, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal. Implementasi e-Government dan pelayanan berbasis teknologi menjadi kontribusi nyata kecamatan dalam mendukung Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan transparan.

Dengan demikian, program-program Kecamatan Bekasi Selatan telah dan akan terus berperan sebagai bagian penting dalam pencapaian visi pembangunan nasional,

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

terutama dalam mendekatkan pelayanan, memperkuat kemandirian warga, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat paling dekat dengan rakyat.

2.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Bekasi merupakan salah satu kawasan perkotaan yang mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi fisik, sosial, maupun ekonomi. Sebagai pusat kegiatan wilayah di kawasan timur metropolitan Jabodetabek, Kota Bekasi menghadapi tantangan besar dalam mengelola laju pembangunan agar tetap berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Salah satu respons kebijakan utama dalam mengarahkan pembangunan wilayah secara terpadu adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011–2031 dan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2015–2035.

Tujuan utama dari penataan ruang ini adalah untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang juga bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara perencanaan tata ruang di tingkat nasional, provinsi, dan daerah serta pengendalian pemanfaatan ruang yang melindungi fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi Kota Bekasi. Penataan ruang Kota Bekasi juga mengakomodasi pelestarian kawasan sejarah dan budaya lokal, perluasan akses terhadap ruang ekonomi bagi masyarakat, serta perlindungan terhadap kawasan rawan bencana.

Dalam konteks wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, kebijakan penataan ruang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan sebagai sub-pusat kota yang memiliki peran strategis dalam struktur ruang Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Selatan berada dalam jaringan sistem transportasi utama dan merupakan bagian dari jaringan jalan arteri sekunder internal kota. Hal ini memberikan potensi besar untuk pemantapan infrastruktur transportasi dan mendukung mobilitas masyarakat dan logistik secara efisien.

Wilayah ini juga termasuk dalam kawasan budidaya dengan peruntukan sebagai kawasan jasa, perdagangan, dan perkantoran, khususnya di sekitar pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Dalam hal ini, pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan pendekatan kawasan siap bangun serta promosi hunian vertikal untuk mengoptimalkan ruang dan menekan laju penyebaran urbanisasi horizontal yang tidak terkendali.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sementara itu, keberadaan kawasan lindung seperti sempadan Kali Bekasi di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan menjadi perhatian utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Kawasan ini ditetapkan sebagai zona konservasi lingkungan dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan di luar peruntukan sesuai dengan ketentuan zonasi yang berlaku. Penegakan aturan pemanfaatan zona lindung, ruang terbuka hijau, serta kawasan rawan bencana menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian ekologis kawasan.

Selain sebagai kawasan strategis dari sisi fungsional ruang, Kecamatan Bekasi Selatan juga memiliki nilai historis dan budaya yang penting, termasuk situs-situs perjuangan dan kawasan wisata edukatif. Maka dari itu, pengembangan kawasan ini diarahkan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk mendukung identitas kota dan pelestarian budaya lokal.

Kebijakan pengembangan ruang mencakup beberapa aspek kunci seperti penguatan jaringan prasarana (energi, telekomunikasi, air bersih, drainase, dan pengelolaan air limbah), pengendalian kawasan kumuh, serta integrasi sistem transportasi dengan wilayah Jabodetabek. Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada sinergi antara pemerintah daerah, investor swasta, dan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan skema pembiayaan campuran (mix financing).

Dengan mengacu pada rencana struktur dan pola ruang sebagaimana tertuang dalam Perda RTRW dan RDTR, Kecamatan Bekasi Selatan wajib menyelaraskan seluruh program dan kegiatan pembangunannya agar tidak bertentangan dengan arahan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Seluruh pengembangan wilayah, baik untuk sektor pemukiman, perdagangan, industri, maupun prasarana umum, harus memperhatikan zonasi, kriteria pemanfaatan ruang, serta potensi dan kendala lokal.

Penataan ruang yang dilaksanakan secara bijaksana akan menjamin keterpaduan antara lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kecamatan Bekasi Selatan sebagai bagian integral dari sistem kota harus menjadi model pembangunan wilayah yang harmonis, berbasis tata ruang yang legal, adaptif terhadap dinamika sosial, dan berpihak pada kelestarian lingkungan.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.8
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator Pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait Perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai/kali Bekasi	Kawasan hunian bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai/kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam Pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam Pengurangan risiko bencana
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara Pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnisdan Pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur Ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

Tabel 2.9
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan
Ruang terbuka Hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran sungai/kali Bekasi	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Tabel 2.10
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada	Pengaruh Rencana Struktur Ruang	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Ruang terbuka Hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran sungai/kali Bekasi	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Tabel 2.11
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan pemukiman	Kurangnya Pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman Masyarakat terhadap tata ruang masih rendah	Peraturan terkait tata ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan bisnis	Kurangnya Pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran Sebagian	Banyaknya warga Masyarakat di kawasan bantaran	Peraturan terkait kawasan bantaran sungaid an

Potensi dan permasalahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bekasi Selatan mencerminkan isu strategis lokal yang berkaitan erat dengan pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur pelayanan, kekurangan ASN, lemahnya sistem data, hingga rawannya wilayah terhadap banjir, menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Isu-isu ini selaras dengan agenda nasional dan global seperti reformasi birokrasi, ketahanan iklim, dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, intervensi strategis perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas pelayanan dasar, pengendalian ruang, dan penguatan kolaborasi kelembagaan.

Potensi dan permasalahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Bekasi Selatan mencerminkan isu strategis lokal yang berkaitan erat dengan pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur pelayanan, kekurangan ASN, lemahnya sistem data, hingga rawannya wilayah terhadap banjir, menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Isu-isu ini selaras dengan agenda nasional dan global seperti reformasi birokrasi, ketahanan iklim, dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, intervensi strategis perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas pelayanan dasar, pengendalian ruang, dan penguatan kolaborasi kelembagaan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.12
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan
Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Sarana dan prasarana pelayanan publik	Banyak infrastruktur pelayanan yang tidak layak dan belum tersedia	Keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar yang layak	Peningkatan kualitas pelayanan publik perkotaan	Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar	Ketimpangan kualitas infrastruktur antar kelurahan	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang layak dan memadai
Aparatur dan SDM Pemerintahan	Kebutuhan ASN belum terpenuhi sesuai tugas dan fungsi	Kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan	Good governance dan profesionalisme ASN	Reformasi birokrasi dan transformasi SDM	Ketimpangan distribusi ASN antarkelurahan	Kekurangan ASN dan rendahnya kompetensi aparatur sesuai kebutuhan unit kerja
Proses perencanaan pembangunan partisipatif	Aspirasi masyarakat belum terakomodir secara menyeluruh	Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Demokratisasi dan pelibatan warga	Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	Minimnya mekanisme penyerapan aspirasi	Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodir dalam pembangunan wilayah
Sistem data dan informasi pembangunan	Basis data pembangunan belum lengkap dan tidak terintegrasi	Ketersediaan data sektoral dan akses informasi publik	Smart city dan pengelolaan data digital	Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Keterbatasan sistem informasi lokal	Lemahnya basis data dan sistem informasi pembangunan di tingkat kecamatan
UMKM dan ekonomi lokal	Dukungan pemberdayaan ekonomi wilayah masih rendah	Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui UMKM	Pemulihan ekonomi lokal pascapandemi	Penguatan ekonomi kerakyatan	Keterbatasan fasilitasi pelaku usaha mikro	Minimnya dukungan fasilitas pemberdayaan ekonomi lokal

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Pelayanan bantuan operasional	Proses pencairan bantuan masih lambat dan tidak efisien	Ketersediaan dan kecepatan distribusi bantuan sosial	Resiliensi sosial masyarakat miskin	Transformasi program bantuan sosial	Terhambatnya proses operasional kelurahan	Keterlambatan distribusi bantuan operasional kegiatan kecamatan dan kelurahan
Penanganan banjir	Wilayah bantaran kali masih rawan banjir dan drainase buruk	Ketahanan lingkungan terhadap bencana banjir	Krisis iklim dan adaptasi wilayah urban	Program pengendalian banjir perkotaan	Ancaman banjir dari hulu dan buruknya saluran air	Ancaman banjir akibat limpasan air dari hulu dan buruknya drainase
Forum koordinasi wilayah (Forkopimcam)	Koordinasi lintas instansi belum berjalan efektif	Sinergitas kelembagaan kewilayahan	Kolaborasi multi-pihak dalam pembangunan daerah	Penguatan koordinasi pemerintah pusat-daerah	Lemahnya koordinasi Forkopimcam	Lemahnya koordinasi lintas instansi kewilayahan (Forkopimcam)
Sosialisasi wawasan kebangsaan	Kegiatan penyuluhan kebangsaan masih minim	Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan	Krisis identitas nasional dan perpecahan sosial	Revitalisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan	Minimnya penyuluhan di masyarakat	Rendahnya intensitas penyuluhan wawasan kebangsaan dan nilai kebinekaan
Penegakan Perda Ketertiban Umum	Lemahnya implementasi penegakan Perda PKL dan K3	Tata kelola wilayah yang tertib dan berkeadilan	Penataan kota dan kawasan informal	Penegakan hukum daerah yang humanis	Kelemahan dalam pengawasan dan sosialisasi	Lemahnya implementasi penegakan Perda Ketertiban dan Penataan PKL

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan

Tujuan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan adalah pernyataan strategis yang menggambarkan arah, peran, dan kontribusi Kecamatan Bekasi Selatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi selama periode lima tahun (2025–2029). Tujuan ini menjadi dasar bagi penjabaran sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan agar selaras dengan kebijakan pembangunan kota dan nasional. Tujuan ini akan dijabarkan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan program kerja kecamatan untuk lima tahun ke depan, agar penyelenggaraan pemerintahan wilayah berjalan responsif, efisien, dan akuntabel.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.1
Kesesuaian NSPK terhadap Tujuan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
- Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Selatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Nilai)
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik (%)
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (%)

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan arah kebijakan untuk meningkatkan estetika kota dengan infrastruktur modern serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya tata kota yang lebih tertata, modern, dan pelayanan publik yang prima.

Sasaran yang ditetapkan meliputi: meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat (LKM) yang mendukung pelayanan publik, meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat, serta peningkatan kepuasan masyarakat di wilayah kecamatan. Untuk mengukur keberhasilan, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, Persentase LKM Aktif, dan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat.

Target tahunan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan naik dari 82,98 pada 2025 menjadi 87,47 pada 2030. Persentase LKM Aktif meningkat bertahap dari 70% pada 2025 hingga 82,5% pada 2030, mencerminkan penguatan partisipasi masyarakat. Sementara itu, persentase peningkatan kepuasan masyarakat ditargetkan naik dari 1,0% pada 2025 menjadi 1,1% pada 2030.

Capaian SKM tahun 2024 sebesar 82,16 dan peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 0,81% menjadi dasar penetapan target tersebut. Dengan pencapaian ini, Kecamatan Bekasi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas..

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Selatan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan Sasaran sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.2
Tujuan Sasaran Kecamatan Bekasi Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Selatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Nilai)	Nilai	82,98	83,83	84,7	86,6	86,52
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik (%)	Persen	70 %	72.5 %	75 %	77.5 %	80 %
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (%)	Persen	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08

Berdasarkan tabel Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2029, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan satu tujuan strategis utama yaitu:

“Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Selatan.”

Tujuan ini menjadi fondasi seluruh perencanaan pembangunan wilayah dan mencerminkan arah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, keteraturan wilayah, serta peningkatan rasa aman bagi masyarakat. Untuk mengukur pencapaian tujuan ini, digunakan satu indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang dinyatakan dalam satuan nilai. Target capaian Indeks RB ditetapkan sebesar 82,98 poin pada tahun 2025 dan dipertahankan secara konsisten hingga tahun 2029. Ini menunjukkan bahwa kecamatan menargetkan pencapaian nilai IKM yang stabil namun tetap memenuhi kepuasan masyarakat yang meningkat progresif dan berkelanjutan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tiga sasaran utama, masing-masing dengan indikator dan target tahunan:

Sasaran 1: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan

Indikatornya adalah Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik, yang ditetapkan dengan target mulai dari 70% setiap tahun dari 2025 hingga 2029. Target ini mencerminkan tekad kuat Kecamatan Bekasi Selatan untuk menjaga keamanan lingkungan, melalui penertiban wilayah, pengawasan zona rawan, serta koordinasi rutin dengan unsur Forkopimcam.

Sasaran 2: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan

Indikatornya adalah Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, dengan satuan persen. Targetnya meningkat setiap tahun:

Tahun	Target
2025	1,00
2026	1,02
2027	1,04
2028	1,06
2029	1,08

Kenaikan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan.

Secara keseluruhan, sasaran dan indikator ini mendukung penuh tercapainya tujuan tata kelola yang baik, aman, dan akuntabel. Peningkatan bertahap pada semua indikator menunjukkan pendekatan realistis dan berkelanjutan, yang mencerminkan kecamatan sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat serta mengawal keberhasilan pelaksanaan visi-misi Pemerintah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

3.3.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian langkah terencana dan menyeluruh yang disusun untuk mengoptimalkan sumber daya, menetapkan tahapan pembangunan, lokus intervensi, serta program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penahapan pembangunan merupakan pengelompokan prioritas pembangunan tahunan sebagai tahapan sistematis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Selatan.

Tabel 3.3
Strategi Kecamatan Bekasi Selatan

Tahun				
2025	2026	2027	2028	2029
Pemutakhiran data zona tertib, identifikasi titik rawan, penyusunan rencana aksi penertiban wilayah.	Penertiban zona prioritas (pasar, jalan utama, fasilitas umum); pelibatan RT/RW dan LKM dalam pengawasan.	Pelaksanaan patroli rutin bersama Forkopimcam, edukasi masyarakat, dan evaluasi wilayah tertib.	Konsolidasi dan replikasi keberhasilan ke zona lainnya; pemanfaatan aplikasi pelaporan warga.	Evaluasi menyeluruh, penguatan regulasi lokal, dan integrasi pengawasan ke sistem pelayanan publik kecamatan.
Survei awal kepuasan masyarakat, pemetaan keluhan dan hambatan layanan, peningkatan pelayanan dasar.	Penyempurnaan SOP, pelatihan petugas layanan, penyediaan fasilitas penunjang pelayanan.	Penerapan sistem antrian digital, penguatan kanal pengaduan dan feedback pengguna layanan.	Integrasi layanan berbasis daring (online), kampanye layanan publik ramah disabilitas.	Peningkatan inovasi layanan, pelibatan masyarakat dalam evaluasi, pencapaian IKM optimal.

Penahapan pencapaian sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Pada tahun 2025, fokus diarahkan pada pemetaan dan validasi zona-zona wilayah yang berpotensi gangguan ketertiban, termasuk kawasan PKL, jalan umum, dan fasilitas publik. Selain itu, dilakukan penyusunan rencana aksi

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

terpadu dengan melibatkan kelurahan, Satpol PP, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat.

Memasuki tahun 2026, penertiban wilayah secara bertahap dilaksanakan, dimulai dari wilayah prioritas tinggi yang sering menjadi keluhan masyarakat. Edukasi masyarakat dan sosialisasi Perda tentang ketertiban menjadi bagian penting. Pada tahun 2027, kegiatan patroli rutin dan forum komunikasi warga digiatkan, serta pelaporan berbasis RT/RW diperkuat.

Tahun 2028 diarahkan pada konsolidasi hasil penertiban, penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKM), dan optimalisasi pelibatan warga dalam pengawasan wilayah. Pada 2029, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan zona tertib dan peningkatan fungsi pengawasan berbasis digital. Target 100% wilayah tertib dijaga secara berkelanjutan sebagai fondasi mewujudkan Kota Bekasi yang aman dan berdaya saing.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan pendekatan berbasis kepuasan masyarakat. Pada tahun 2025, Kecamatan Bekasi Selatan akan melakukan survei awal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), identifikasi kendala layanan, serta pemetaan jenis layanan prioritas. Penyempurnaan SOP pelayanan dan peningkatan etika petugas front office juga dimulai tahun ini.

Pada tahun 2026, penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pelatihan petugas, penyediaan fasilitas ruang tunggu yang ramah disabilitas, dan pemasangan media informasi layanan. Di tahun 2027, pengembangan sistem antrian digital dan pengaduan layanan berbasis daring mulai diterapkan secara terbatas di kecamatan dan diperluas ke kelurahan.

Tahun 2028 diarahkan pada penguatan kanal layanan elektronik melalui aplikasi layanan publik terpadu. Kolaborasi dengan dinas teknis dan CSR didorong untuk penyediaan infrastruktur pelayanan. Tahun 2029 menjadi tahun konsolidasi, inovasi layanan berbasis partisipasi warga, dan pengembangan penghargaan layanan prima tingkat RT/RW atau kelurahan.

Target peningkatan IKM dari 82,98 menjadi 86,52 pada akhir 2029 mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kecamatan Bekasi Selatan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tahun 2026 diarahkan pada integrasi sistem pelaporan kegiatan dengan pengukuran kinerja, peningkatan partisipasi seluruh seksi dalam menyusun laporan yang sistematis dan berbobot. Di tahun 2027, kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara triwulanan, serta penggunaan indikator hasil mulai diperluas.

Tahun 2028 merupakan fase pengembangan sistem pelaporan elektronik (e-SAKIP) berbasis cloud lokal dan penguatan validasi internal atas dokumen perencanaan dan pelaporan. Pengawasan oleh sekretariat dan pimpinan diformalkan menjadi agenda berkala.

3.3.2 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Bekasi Selatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keteladan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Kecamatan Bekasi Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BEKASI SELATAN		KET
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1	Peningkatan Infrastruktur perumahan dan permukiman masyarakat yang layak	1	Mendorong perbaikan sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota	2	Percepatan penanganan prevalensi gizi kurang dengan	2	Mengembangkan sistem pelayanan publik digital berbasis aplikasi dan integrasi data layanan.	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BEKASI SELATAN		KET
		3	melibatkan peran aktif perempuan (PKK) dan kelembagaan masyarakat setempat	3	Meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan publik melalui penyediaan fasilitas ramah difabel dan ruang layanan terpadu.	
		4	Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang	4	Penguatan peran front office melalui pelatihan layanan prima bagi petugas pelayanan.	
		5	ditangani	5	Meningkatkan koordinasi lintas sektor (PKK, LPM, RT/RW) dalam mendukung	
			Pengembangan kompetensi SDM aparat pemerintah	6	program intervensi sosial berbasis masyarakat.	
			Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	7	Menyelenggarakan forum dialog dan survei berkala untuk mengukur dan menindaklanjuti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	
				8	Mendorong pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis SAKIP, pelayanan prima, dan penggunaan teknologi informasi.	
				9	Mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja internal berbasis hasil dan mendorong budaya kerja berorientasi outcome.	
					Meningkatkan disiplin pelaporan dan akuntabilitas unit kerja melalui pengawasan internal berkala dan dokumentasi kegiatan berbasis digital.	

Kecamatan Bekasi Selatan sebagai bagian dari perangkat daerah kewilayahan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Salah satu sasaran utama yang relevan adalah “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima”. Dalam konteks ini, arah kebijakan Kecamatan Bekasi Selatan diarahkan pada penguatan layanan masyarakat yang mudah diakses, responsif, dan berkualitas.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sebagai upaya konkret, kecamatan akan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, baik di kantor kecamatan maupun kelurahan. Hal ini mencakup perbaikan ruang tunggu, loket pelayanan, serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas melalui sistem pelayanan digital, integrasi aplikasi administrasi kependudukan, dan penyederhanaan proses layanan berbasis daring. Upaya ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan publik.

Sejalan dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota”, Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan arah kebijakan yang mencakup peningkatan kualitas tata kelola, pembenahan sistem pelaporan, dan penguatan kapasitas aparatur. Pengembangan kompetensi ASN menjadi prioritas, terutama dalam bidang pengelolaan kinerja, pelayanan prima, serta pemanfaatan aplikasi e-kinerja dan e-SAKIP. Kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala akan diselenggarakan untuk mendukung pemahaman ASN terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Di sisi lain, penguatan kolaborasi kelembagaan juga menjadi bagian dari strategi kecamatan. Keterlibatan PKK, RT/RW, dan LKM akan ditingkatkan dalam mendukung program sosial kemasyarakatan seperti penanganan stunting, gizi buruk, hingga pendataan keluarga miskin. Forum warga dan survei kepuasan masyarakat akan dijadikan dasar untuk mengevaluasi kualitas layanan serta menjaring masukan dari masyarakat secara partisipatif.

Sebagai langkah perbaikan akuntabilitas internal, Kecamatan Bekasi Selatan juga akan mengembangkan sistem pengawasan kinerja secara mandiri melalui monitoring dan evaluasi triwulan, pengarsipan dokumen kinerja digital, dan audit internal sederhana. Diharapkan, arah kebijakan ini dapat meningkatkan nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan secara konsisten setiap tahun, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bermutu.

Dengan demikian, arah kebijakan kecamatan tidak hanya mendukung RPJMD Kota Bekasi, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan melayani.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai panduan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bekasi Selatan periode 2025–2029. Renstra ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Tabel 4.1
Keseuaian NSPK dengan Program

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
1	2	3	4	5
- Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tertib, dan Aman di Kecamatan Bekasi Selatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Terdapat 5 program yang diampu oleh kecamatan Bekasi Selatan untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu:

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program strategis yang berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, di lingkungan perangkat daerah. Program ini mencakup kegiatan yang bersifat administratif, manajerial, dan penguatan kelembagaan, guna menjamin efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, program ini tidak hanya berperan sebagai penunjang teknis, tetapi juga sebagai fondasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini, telah ditetapkan empat indikator utama yang merefleksikan aspek tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas sumber daya manusia.

Pertama, Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran, yang menggambarkan sejauh mana rencana kerja perangkat daerah telah selaras dengan alokasi anggaran, sehingga mendukung pencapaian target kinerja secara efektif dan terukur.

Kedua, Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada program penunjang, termasuk realisasi keuangan sesuai dengan target yang direncanakan.

Ketiga, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah, sebagai ukuran kualitas SDM aparatur dalam hal kompetensi, integritas, dan kinerja pelayanan publik. Indeks ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar profesionalisme.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Keempat, Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, yang menilai transparansi, ketertiban, dan akurasi dalam pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari akuntabilitas tata kelola.

Melalui indikator-indikator ini, pelaksanaan Program Penunjang dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Target pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator	BASE LINE 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	84,3 4%	84,4%	84,4 %	84,5 %	84,6 %	84,7 %	84,8 %
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kualitas layanan publik melalui perbaikan sistem, prosedur, dan kompetensi aparatur. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah tingkat capaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang mencerminkan persepsi dan pengalaman langsung masyarakat atas layanan yang diberikan. Melalui evaluasi rutin atas kepuasan ini, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan berkelanjutan demi memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Target pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Target Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program	Indikator	Base line 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun kemandirian sosial di tingkat

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, memperkuat peran serta warga dalam pembangunan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di lingkungan desa dan kelurahan.

Indikator keberhasilan program ini diukur melalui dua aspek utama: Persentase Jumlah Kelembagaan yang Aktif dan Tersusunnya Profil Kelurahan secara lengkap dan mutakhir. Kelembagaan yang dimaksud mencakup berbagai organisasi masyarakat yang berperan langsung dalam pelayanan sosial dasar, pembangunan, dan penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Kelembagaan tersebut antara lain Posyandu, yang mendukung layanan kesehatan ibu dan anak; PKK, yang mendorong pemberdayaan keluarga dan ekonomi rumah tangga; serta kelembagaan lingkungan seperti RT, RW, LPM, BKM, dan MUB yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan lingkungan. Selain itu, peran tokoh keagamaan seperti imam masjid dan marbot juga tak kalah penting dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan harmoni sosial.

Tingkat keaktifan kelembagaan ini mencerminkan dinamika sosial dan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri. Sementara itu, keberadaan Profil Kelurahan yang akurat menjadi dasar dalam menyusun program-program yang tepat sasaran. Dengan sinergi antara pemerintah dan kelembagaan masyarakat, diharapkan program ini mampu meningkatkan kualitas hidup warga, memperkuat modal sosial, serta mendorong pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi lokal secara berkelanjutan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Target pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Target Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program	Indikator	Base line 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertujuan menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi lintas sektor serta penguatan peran pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu indikator utama keberhasilan program ini adalah persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat, yang mencerminkan efektivitas pemerintah dalam merespons dan menyelesaikan potensi gangguan sosial secara cepat dan adil. Program ini mencakup upaya mediasi, fasilitasi dialog antarwarga, serta pendekatan berbasis kearifan lokal untuk mencegah eskalasi konflik. Dengan penanganan yang tepat, stabilitas sosial dan rasa aman di lingkungan masyarakat dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Target pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.5
Target Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program	Indikator	Base line 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.1.5 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan untuk menjaga kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Program ini menekankan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum, khususnya dalam hal Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3). Indikator keberhasilannya diukur melalui persentase wilayah yang memenuhi standar tertib K3, yang mencerminkan efektivitas pengawasan, kesadaran warga, dan penegakan peraturan. Melalui program ini, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih, bebas dari pelanggaran ketertiban, serta mendukung kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Target pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Target Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program	Indikator	BASELINE 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Daerah merancang berbagai program strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Program-program ini mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Seluruh kegiatan dirancang dengan indikator kinerja yang terukur dan target capaian yang maksimal, yakni rata-rata 100% setiap tahunnya, sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu fondasi utama dalam perencanaan ini. Fokus utamanya adalah memastikan keselarasan antara perencanaan perangkat daerah dengan proses penganggaran. Dengan target 100% tiap tahun, program ini mengintegrasikan seluruh kegiatan pembangunan dengan pendanaan yang tepat, sehingga mampu menghindari tumpang tindih kebijakan serta mengoptimalkan alokasi anggaran.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja juga menjadi perhatian penting. Seluruh perangkat daerah dituntut untuk menerapkan siklus manajemen kinerja secara menyeluruh, dengan target capaian 100% yang diharapkan menghasilkan kinerja yang lebih terarah dan terukur. Di samping itu, kinerja keuangan penunjang urusan ditargetkan mencapai 93% pada tahun awal dan meningkat menjadi 100% pada tahun-tahun berikutnya, mencerminkan perbaikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien.

Administrasi keuangan dan kepegawaian juga menjadi bagian vital dari program ini. Seluruh perangkat daerah ditargetkan untuk melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian dengan tingkat kepatuhan 100%. Selain itu, peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terus didorong, yang tercermin dari target kenaikan Indeks Profesionalitas ASN dari 84,34% pada tahun 2024 menjadi 84,80% pada tahun 2030. Hal ini

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

menunjukkan upaya berkelanjutan dalam membentuk birokrasi yang kompeten dan melayani.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara akuntabel juga menjadi sasaran utama, baik dalam hal pengadaan, penyediaan jasa, hingga pemeliharaan. Semua indikator pada program ini ditargetkan 100%, yang berarti seluruh proses harus dilakukan secara tertib, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan BMD yang baik akan berkontribusi langsung pada kelancaran kegiatan operasional pemerintahan serta optimalisasi pelayanan publik.

Dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, capaian kepuasan masyarakat menjadi indikator utama. Pemerintah daerah menargetkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar 100% setiap tahunnya, sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum juga diperkuat, untuk memastikan fasilitas publik selalu dalam kondisi layak guna.

Untuk memperkuat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Kelembagaan kemasyarakatan ditargetkan aktif 100%, sementara kegiatan pemberdayaan di tingkat kelurahan dan kecamatan juga memiliki target serupa. Hal ini menunjukkan peran strategis masyarakat dalam pembangunan lokal, serta dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Dalam rangka menjamin stabilitas sosial dan ketertiban umum, program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan secara intensif. Persentase wilayah tertib K3 dan koordinasi upaya ketertiban umum ditargetkan 100%, guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai program dan kegiatan yang dirancang dalam dokumen ini menunjukkan arah pembangunan daerah yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi. Fokus utamanya adalah menciptakan pemerintahan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

daerah yang profesional, melayani, dan berorientasi hasil, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan penguatan kelembagaan birokrasi.

Target pada 5 Program dan 13 Kecamatan pada Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Target Program pada masa Renstra 2025-2029

Program/ Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
			Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Perangkat Daerah	84,34 %	84,40 %	84,40 %	84,50 %	84,60 %	84,70 %	84,80 %

Program/ Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
			Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program/ Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
			Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik
	masyarakat							
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persentase Penyelenggaraan Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program/ Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
			Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik
Penugasan Kepala Daerah	Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

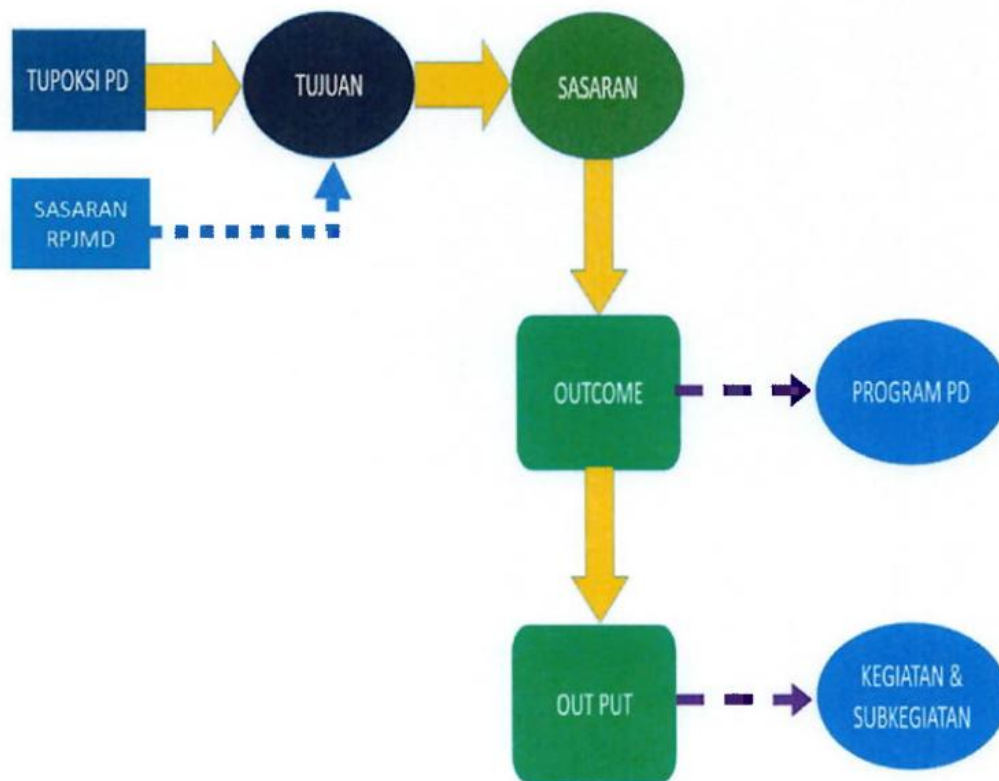
4.2.1 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Sebagai bagian dari pelaksanaan program strategis Pemerintah Kota dalam periode 2025–2029, sub kegiatan di Kecamatan Bekasi Selatan dan kelurahan-kelurahan di bawahnya—yakni Pekayonjaya, Kayuringinjaya, Jakasetia, Jakamulya, dan Margajaya—difokuskan pada penguatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penataan wilayah.

Di tingkat kecamatan, sub kegiatan diarahkan untuk mendukung fungsi koordinatif pemerintahan dan pelayanan administrasi. Ini mencakup fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan, pemantauan pelaksanaan pembangunan kelurahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan forum komunikasi antar pemangku kepentingan wilayah.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 4
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah



Sementara itu, sub kegiatan di kelurahan difokuskan pada pelayanan langsung kepada masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan RT/RW, PKK, Karang Taruna, serta fasilitasi kegiatan musyawarah warga. Selain itu, kelurahan juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan keterampilan, kerja bakti, edukasi lingkungan, serta dukungan terhadap UMKM dan kelompok rentan.

Dalam rangka mendukung operasional kelurahan, dilakukan pula kegiatan pengelolaan aset, pemeliharaan fasilitas publik, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan. Keseluruhan sub kegiatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

ini dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan peran aktif masyarakat, tokoh lokal, dan lembaga kemasyarakatan.

Dengan pelaksanaan sub kegiatan yang merata dan terarah di seluruh kelurahan, diharapkan tercipta pemerintahan yang efektif, responsif, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh warga Kecamatan Bekasi Selatan.

Berikut merupakan kerangka rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan pendanaan tahun anggaran 2025-2029:

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.8
Rencana Kerja Kecamatan bekasi Selatan tahun 2025-2029

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
KECAMATAN BEKASI SELATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	82,16	82,98	48.222.633.000,00	83,83	50.599.529.390,00	84,70	53.509.822.283,00	85,60	56.249.107.182,00	86,52	58.580.080.475,00	
	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	N/A	70		72,5		75		77,5		80		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase LKM Aktif	100,00%	100,00%	23.165.457.000,00	100,00%	24.365.427.673,00	100,00%	25.768.876.307,00	100,00%	27.088.242.773,00	100,00%	28.540.172.586,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	22.855.457.000,00	100%	24.055.427.673,00	100%	25.458.876.307,00	100%	26.778.242.773,00	100%	28.230.172.586,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6,00 Lembaga	6,00 Lembaga	145.000.000,00	6,00 Lembaga	159.500.000,00	6,00 Lembaga	167.475.000,00	6,00 Lembaga	169.149.700,00	6,00 Lembaga	177.607.300,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Jakasetia
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Jakamulya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Pekayonjaya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	1,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Kayuringinjaya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3,00 Unit	3,00 Unit	200.000.000,00	3,00 Unit	200.000.000,00	3,00 Unit	200.000.000,00	3,00 Unit	200.000.000,00	3,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Margajaya
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	7,00 Pokmas	7,00 Pokmas	570.000.000,00	7,00 Pokmas	627.000.000,00	7,00 Pokmas	658.350.000,00	7,00 Pokmas	664.933.500,00	7,00 Pokmas	698.180.200,00	Kecamatan Bekasi

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												Selatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259,00 Pokmas	259,00 Pokmas	4.279.761.600,00	259,00 Pokmas	4.510.622.695,00	259,00 Pokmas	4.782.897.421,00	259,00 Pokmas	5.049.107.834,00	259,00 Pokmas	5.334.166.617,00	Kelurahan Jakaseta
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188,00 Pokmas	188,00 Pokmas	3.615.000.000,00	188,00 Pokmas	3.779.384.994,00	188,00 Pokmas	4.051.659.721,00	188,00 Pokmas	4.273.630.134,00	188,00 Pokmas	4.519.915.217,00	Kelurahan Jakamulya
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279,00 Pokmas	279,00 Pokmas	5.539.720.600,00	279,00 Pokmas	5.896.577.694,00	279,00 Pokmas	6.168.852.421,00	279,00 Pokmas	6.518.912.934,00	279,00 Pokmas	6.877.462.117,00	Kelurahan Pekayonjaya
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269,00 Pokmas	269,00 Pokmas	5.994.382.800,00	269,00 Pokmas	6.396.706.094,00	269,00 Pokmas	6.668.980.821,00	269,00 Pokmas	7.049.299.134,00	269,00 Pokmas	7.434.367.617,00	Kelurahan Kayuringinjaya

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Masyarakat di Kelurahan												
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51,00 Pokmas	51,00 Pokmas	1.661.592.000,00	51,00 Pokmas	1.630.636.196,00	51,00 Pokmas	1.902.910.923,00	51,00 Pokmas	1.994.882.037,00	51,00 Pokmas	2.127.229.618,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6,00 Laporan	6,00 Laporan	50.000.000,00	6,00 Laporan	55.000.000,00	6,00 Laporan	57.750.000,00	6,00 Laporan	58.327.500,00	6,00 Laporan	61.243.900,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	310.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	310.000.000,00	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	35.000.000,00	2,00 Lembaga	35.000.000,00	2,00 Lembaga	35.000.000,00	2,00 Lembaga	35.000.000,00	2,00 Lembaga	35.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Jakastia
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Jakamulya
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Pekayonjaya
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Kayuringinjaya
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Margajaya

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12,00 Laporan	12,00 Laporan	75.000.000,00	12,00 Laporan	75.000.000,00	12,00 Laporan	75.000.000,00	12,00 Laporan	75.000.000,00	12,00 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
	Persentase peningkatan kepuasan Masyarakat di Kecamatan	0,81 %	1%		1,02 %		1,04 %		1,06 %		1,08 %		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a		100,0 0%	100,0 0%	24.657.176.000,00	100,0 0%	25.813.381.717,00	100,0 0%	27.295.992.504,00	100,0 0%	28.693.129.320,00	100,0 0%	29.547.102.199,00	
	Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100,0 0%	100,0 0%	15.000.000,00	100,0 0%	16.500.000,00	100,0 0%	17.325.000,00	100,0 0%	17.498.200,00	100,0 0%	18.373.200,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	15.000.000,00	100%	16.500.000,00	100%	17.325.000,00	100%	17.498.200,00	100%	18.373.200,00	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Perangkat Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,00 Laporan	14,00 Laporan	5.000.000,00	14,00 Laporan	5.500.000,00	14,00 Laporan	5.775.000,00	14,00 Laporan	5.832.700,00	14,00 Laporan	6.124.400,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,00 Dokumen	14,00 Dokumen	10.000.000,00	14,00 Laporan	11.000.000,00	14,00 Laporan	11.550.000,00	14,00 Laporan	11.665.500,00	14,00 Laporan	12.248.800,00	Kecamatan Bekasi Selatan
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100,00%	100,00%	20.533.030.200,00	100,00%	21.468.901.717,00	100,00%	22.792.788.504,00	100,00%	24.117.093.420,00	100,00%	24.805.764.199,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	100%	20.533.030.200,00	100%	21.468.901.717,00	100%	22.792.788.504,00	100%	24.117.093.420,00	100%	24.805.764.199,00	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.988,00 Orang/bulan	5180,00 Orang/bulan	20.528.030.200,00	5180,00 Orang/bulan	21.463.401.717,00	5180,00 Orang/bulan	22.787.013.504,00	5180,00 Orang/bulan	24.111.260.720,00	5180,00 Orang/bulan	24.799.639.799,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,00 Laporan	14,00 Laporan	5.000.000,00	14,00 Laporan	5.500.000,00	14,00 Laporan	5.775.000,00	14,00 Laporan	5.832.700,00	14,00 Laporan	6.124.400,00	Kecamatan Bekasi Selatan
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	84,38	84,4	20.000.000,00	84,5	20.000.000,00	84,6	20.000.000,00	84,7	20.000.000,00	84,8	20.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00 Orang	3,00 Orang	10.000.000,00	3,00 Orang	10.000.000,00	3,00 Orang	10.000.000,00	3,00 Orang	10.000.000,00	3,00 Orang	10.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61,00 Orang	61,00 Orang	10.000.000,00	61,00 Orang	10.000.000,00	61,00 Orang	10.000.000,00	61,00 Orang	10.000.000,00	61,00 Orang	10.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100,00%	100,00%	4.089.145.800,00	100,00%	4.307.980.000,00	100,00%	4.465.879.000,00	100,00%	4.538.537.700,00	100,00%	4.702.964.800,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	705.000.000,00	100%	775.500.000,00	100%	814.275.000,00	100%	822.417.700,00	100%	863.538.700,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1,00 Paket	1,00 Paket	20.000.000,00	1,00 Paket	22.000.000,00	1,00 Paket	23.100.000,00	1,00 Paket	23.331.000,00	1,00 Paket	24.497.500,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
gan Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3,00 Paket	350.000.000,00	3,00 Paket	385.000.000,00	3,00 Paket	404.250.000,00	3,00 Paket	408.292.500,00	3,00 Paket	428.707.200,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2,00 Paket	125.000.000,00	2,00 Paket	137.500.000,00	2,00 Paket	144.375.000,00	2,00 Paket	145.818.700,00	2,00 Paket	153.109.700,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	44.000.000,00	12,00 Dokumen	46.200.000,00	12,00 Dokumen	46.662.000,00	12,00 Dokumen	48.995.100,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12,00 Laporan	120.000.000,00	12,00 Laporan	132.000.000,00	12,00 Laporan	138.600.000,00	12,00 Laporan	139.986.000,00	12,00 Laporan	146.985.300,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan	50,00 Dokumen	50,00 Dokumen	50.000.000,00	50,00 Dokumen	55.000.000,00	50,00 Dokumen	57.750.000,00	50,00 Dokumen	58.327.500,00	50,00 Dokumen	61.243.900,00	Kecamatan Bekasi

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD												Selatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	250.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	281.000.000,00	100%	283.310.000,00	100%	294.975.500,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24,00 Unit	24,00 Unit	200.000.000,00	24,00 Unit	220.000.000,00	24,00 Unit	231.000.000,00	24,00 Unit	233.310.000,00	24,00 Unit	244.975.500,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	5 Unit	50.000.000,00	5 Unit	50.000.000,00	5 Unit	50.000.000,00	5 Unit	50.000.000,00	5 Unit	50.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.484.145.800,00	100%	2.547.480.000,00	100%	2.619.854.000,00	100%	2.674.552.500,00	100%	2.748.280.200,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Laporan	12,00 Laporan	356.800.000,00	12,00 Laporan	397.480.000,00	12,00 Laporan	419.854.000,00	12,00 Laporan	424.552.500,00	12,00 Laporan	448.280.200,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	2.127.345.800,00	12,00 Laporan	2.150.000.000,00	12,00 Laporan	2.200.000.000,00	12,00 Laporan	2.250.000.000,00	12,00 Laporan	2.300.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	650.000.000,00	100%	715.000.000,00	100%	750.750.000,00	100%	758.257.500,00	100%	796.170.400,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2,00 Unit	100.000.000,00	2,00 Unit	110.000.000,00	2,00 Unit	115.500.000,00	2,00 Unit	116.655.000,00	2,00 Unit	122.487.700,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00 Unit	33,00 Unit	240.000.000,00	33,00 Unit	265.000.000,00	33,00 Unit	278.750.000,00	33,00 Unit	281.637.500,00	33,00 Unit	296.219.400,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Pemeliharaan n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Pemeliharaan n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,00 Unit	50,00 Unit	100.000.000,00	50,00 Unit	110.000.000,00	50,00 Unit	115.500.000,00	50,00 Unit	116.655.000,00	50,00 Unit	122.487.800,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Pemeliharaan n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 Unit	2,00 Unit	200.000.000,00	2,00 Unit	220.000.000,00	2,00 Unit	231.000.000,00	2,00 Unit	233.310.000,00	2,00 Unit	244.975.500,00	Kecamatan Bekasi Selatan
Program Penyelenggara	Persentase Peningkatan	100,00%	100,00%	300.000.000,00	100,00%	315.540.000,00	100,00%	333.715.104,00	100,00%	350.801.317,00	100,00%	369.604.268,00	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat di Kecamatan												
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	230.000.000,00	100%	240.000.000,00	100%	252.000.000,00	100%	264.000.000,00	100%	276.000.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	42.000.000,00	12,00 Dokumen	44.000.000,00	12,00 Dokumen	46.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	42.000.000,00	12,00 Dokumen	44.000.000,00	12,00 Dokumen	46.000.000,00	Kelurahan Jakaseta
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	42.000.000,00	12,00 Dokumen	44.000.000,00	12,00 Dokumen	46.000.000,00	Kelurahan Jakamulya

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	42.000.000,00	12,00 Dokumen	44.000.000,00	12,00 Dokumen	46.000.000,00	Kelurahan Pekayonjaya
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	40.000.000,00	12,00 Dokumen	42.000.000,00	12,00 Dokumen	44.000.000,00	12,00 Dokumen	46.000.000,00	Kelurahan Kayuringinjaya

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	120,000	120,000	30.000.000,00	120,000	40.000.000,00	120,000	42.000.000,00	120,000	44.000.000,00	120,000	46.000.000,00	Kelurahan Margajaya
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	70.000.000,00	100%	75.540.000,00	100%	81.715.104,00	100%	86.801.317,00	100%	93.604.268,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	70.000.000,00	12,00 Laporan	75.540.000,00	12,00 Laporan	81.715.104,00	12,00 Laporan	86.801.317,00	12,00 Laporan	93.604.268,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Perizinan Non Usaha												
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,0 0%	100,0 0%	50.000.0 00,00	100,0 0%	52.590.0 00,00	100,0 0%	55.619.1 84,00	100,0 0%	58.466.8 86,00	100,0 0%	61.600.7 11,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	50.000.0 00,00	100%	52.590.0 00,00	100%	55.619.1 84,00	100%	58.466.8 86,00	100%	61.600.7 11,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Doku men	12,00 Doku men	50.000.0 00,00	12,00 Doku men	52.590.0 00,00	12,00 Doku men	55.619.1 84,00	12,00 Doku men	58.466.8 86,00	12,00 Doku men	61.600.7 11,00	Kecam atan Bekasi Selata n
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib	100,0 0%	100,0 0%	50.000.0 00,00	100,0 0%	52.590.0 00,00	100,0 0%	55.619.1 84,00	100,0 0%	58.466.8 86,00	100,0 0%	61.600.7 11,00	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Urusan / PD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	BASE LINE 2024	Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030		Lokasi
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	50.000.000,00	100%	52.590.000,00	100%	55.619.184,00	100%	58.466.886,00	100%	61.600.711,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	50.000.000,00	12,00 Laporan	52.590.000,00	12,00 Laporan	55.619.184,00	12,00 Laporan	58.466.886,00	12,00 Laporan	61.600.711,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4.2.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota, telah disusun berbagai program dan sub kegiatan strategis. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencakup koordinasi ketertiban umum, sinergi dengan TNI/Polri dan instansi vertikal, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Sementara itu, dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, fokus diarahkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum melalui koordinasi lintas sektor.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan sarana, dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat. Kegiatan ini memperkuat peran kelembagaan seperti RT, RW, PKK, dan Karang Taruna sebagai mitra kelurahan dalam pembangunan.

Untuk mendukung peningkatan kinerja, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD, pengelolaan keuangan dan kepegawaian, serta penyediaan sarana pendukung seperti barang, jasa, dan pemeliharaan aset. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan mendukung efektivitas pelayanan, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan.

Tabel 4.9
Sub Kegiatan pada Program Prioritas

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektifitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4.2.3 Target Keberhasilan terhadap IKU

Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum mendukung IKU di bidang stabilitas dan ketentraman wilayah, melalui sinergi dengan TNI/Polri serta koordinasi lintas instansi.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, khususnya pemeliharaan sarana pelayanan umum, berkontribusi pada IKU yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan. Infrastruktur yang terawat dengan baik meningkatkan akses dan kenyamanan pelayanan publik.

Sementara itu, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berperan penting dalam mendukung IKU terkait partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal. Peningkatan peran aktif warga dan lembaga kemasyarakatan memperkuat kemandirian serta responsivitas kelurahan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendukung IKU pada aspek akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan, melalui perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi, dan pengadaan barang/jasa. Profesionalisme ASN juga ditingkatkan melalui pelatihan dan evaluasi kinerja.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Secara keseluruhan, seluruh kegiatan dirancang untuk menghasilkan dampak nyata terhadap pencapaian IKU, baik dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 4.10
Target Indikator Kinerja Utama

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	Persen	N/A	70	72,5	75	77,5	80
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	0,81	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yakni periode 2025–2029. Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada visi dan misi kepala daerah, tujuan pembangunan jangka menengah daerah, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kota Bekasi.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, serta strategi dan arah kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan tantangan aktual. Dengan perencanaan yang terstruktur dan terukur, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan juga telah mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor dan berbasis kewilayahan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Fokus utama Renstra ini tidak hanya pada peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan. Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan menjadi tolok ukur pencapaian visi pembangunan daerah, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran perangkat daerah, termasuk dukungan dari masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat, komunikasi yang efektif, dan pengawasan yang partisipatif guna memastikan bahwa seluruh rencana yang telah ditetapkan benar-benar dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang berdampak nyata.

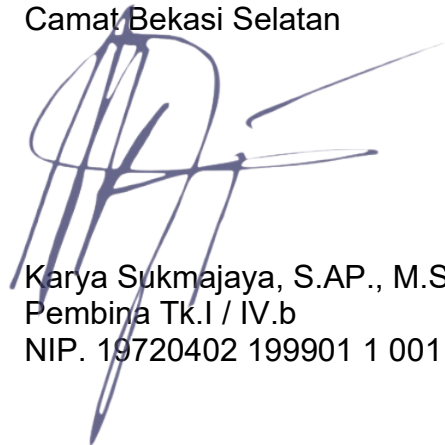
Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki arah yang jelas dan konsisten dalam menjalankan mandatnya, serta mampu menyelaraskan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan daerah. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi instrumen

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, melayani, dan berorientasi pada hasil, demi mewujudkan Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi selatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi selatan.

Bekasi
Camat Bekasi Selatan

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned over the printed name and title.

Karya Sukmajaya, S.AP., M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19720402 199901 1 001